



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) DI
KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN KURANJI KOTA
PADANG**

SKRIPSI



**RACHMA WAHIDA
1110222054**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2015**

**PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN
LESTARI (KRPL) DI KELURAHAN KORONG GADANG
KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG**

OLEH

**RACHMA WAHIDA
1110222054**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pertanian**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2015

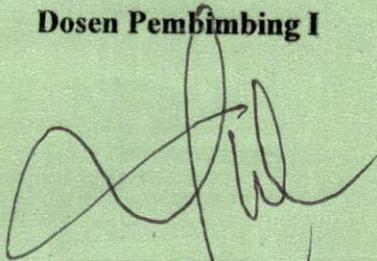
**PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN
LESTARI (KRPL) DI KELURAHAN KORONG GADANG
KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG**

SKRIPSI

**OLEH
RACHMA WAHIDA
1110222054**

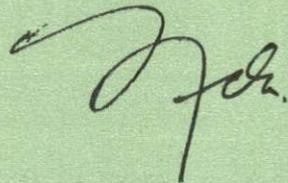
MENYETUJUI :

Dosen Pembimbing I



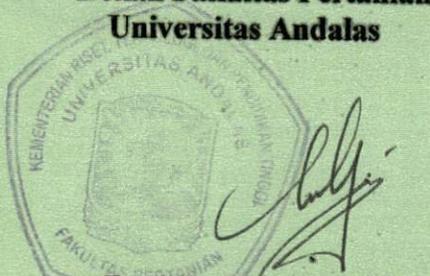
**Ferdhinal Asful, SP, M.Si
NIP. 197102232005011004**

Dosen Pembimbing II



**Dr. Ir. Ifdal, M.Sc
NIP. 196709102001121002**

**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**



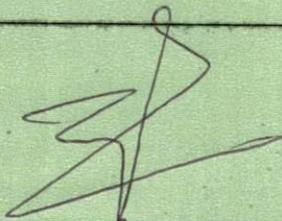
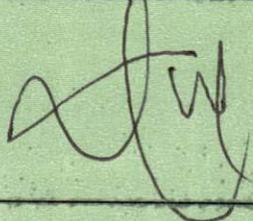
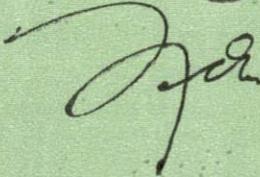
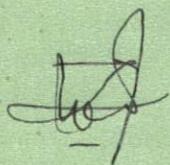
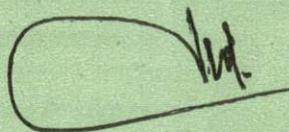
**Prof. Ir. H. Ardi, M.Sc
NIP. 195312161980031004**

**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian Universitas Andalas**



**Dr. Ir. Osmet, M.Sc
NIP. 195510191987021001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana
Fakultas Pertanian Universitas Andalas, pada tanggal 30 Juli 2015

No.	NAMA	TANDA TANGAN	JABATAN
1.	Mahdi, SP, M.Si, Ph.D		Ketua
2.	Ferdhinal Asful, SP, M.Si		Sekretaris
3.	Dr. Ir. Ifdal, M.Sc		Anggota
4.	Dr. Zulvera, SP, M.Si		Anggota
5.	Ir. Dwi Evaliza, M.Si		Anggota



Segala puji bagi ALLAH yang telah merubah lelah menjadi berkah, yang menjadikan sabar sebagai kuncinya dan menjadikan iman sebagai kekuatannya.

"... dan ALLAH tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri ..."

(Qs Ar-Ra'ad: 11)

Karya sederhana ini aim persembahkan untuk beliau yang tak pernah hentinya berdoa dan berusaha demi anak-anaknya. Yang menjamin seluruh anggota tubuhnya demi kebahagiaan anak-anaknya. Beliau adalah Ibu, yang mampu memainkan dua peran dalam hidupnya sebagai ayah dan sebagai ibu. Terimakasih atas segala penghidupan yang diberikan semoga karya sederhana ini mampu melukiskan senyum di wajah beliau.

Hormat dan rasa terimakasih yang setulusnya aim ucapkan kepada Bapak Ferdhinal Asful, SP, M.Si dan Bapak Dr. Ir. Ifdal, M.Sc yang dengan kesabaran dan kerendahan hati membimbing aim sehingga karya sederhana ini dapat aim selesaikan. Terimakasih juga kepada Bapak Mahdi, SP, M.Si, Ph.D Ibu Dr. Zulvera, SP, M.Si dan Ibu Ir. Dwi Evaliza, SP, M.Si.

Spesial untuk mereka yang terkadang menjadi benar-benar sepaham dan terkadang menjadi lawan dalam perdebatan, mereka Kepang (Effaliza), Juju (Reza J), Uul (Lia), Diptokok (Dipta), Nugong (Nugi), Nurok (Octa) dan Nia (Karunia). Terimakasih untuk Feri Fernando, SPd atas doa dan semangatnya yang selalu diberikan saat aim benar-benar lelah dan putus asa. Dan terimakasih untuk keluarga Agribisnis 2011 yang sama-sama berjuang mulai dari zamannya Rok-rokan sampai zamannya jadi anak gawol. Terimakasih juga untuk mereka yang telah membantu aim dan memberikan dukungan yang tidak dapat aim sebutkan satu satu.

"Jadilah seperti padi makin berisi makin merunduk".

Yang selalu bermimpi dan berharap
Rachma wahida
(naim Rachma)
(aim)

BIODATA

Penulis dilahirkan di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 12 Juni 1993 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Tukul (alm) dan Ibu Sudarmi. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di SD Negeri 26 Air Tawar Timur Padang (1999-2005). Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh di SMP Negeri 13 Padang (2005-2008). Untuk jenjang pendidikan selanjutnya penulis menamatkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Padang, lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Agribisnis.

Padang, Juli 2015

Rachma Wahida

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang”.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Bapak Ferdhinal Asful, SP, M.Si dan Bapak Dr. Ir. Ifdal, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, saran dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahdi, SP, M.Si, Ph.D Ibu Ir. Dwi Evaliza, M.Si dan Ibu Dr. Zulvera, SP, M.Si selaku dosen undangan yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Pertanian Bapak Prof. Dr. Ir. Ardi M.Sc, Bapak Ketua Jurusan Dr. Ir. Osmet, M.Sc dan seluruh dosen pengajar juga karyawan Fakultas Pertanian, serta teman-teman dan semua pihak yang telah memberi dorongan dan semangat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada orang tua atas doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari segala pihak bagi perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, Juli 2015

Rachma Wahida

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pembangunan Pertanian	8
B. Ketahanan Pangan	11
C. Perencanaan Program Pembangunan Pertanian	14
D. Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>)	17
E. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	21
F. Kelompok Wanita Tani	24
G. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	29
B. Metode Penelitian.....	29
C. Metode Pengumpulan Data	30
D. Topik Data	31
E. Analisa Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan Korong Gadang.....	35
B. Profil KWT Lestari Padi Rimbun.....	40
C. Pelaksanaan Program KRPL di KWT Lestari Padi Rimbun	47
D. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan KRPL Di KWT Lestari Padi Rimbun.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Informan Kunci	31
2. Peran Pemangku Kepentingan dalam Program KRPL.....	33
3. Penggunaan lahan di Kelurahan Korong Gadang Tahun 2012.....	36
4. Jumlah Penduduk Kecamatan Kuranji Tahun 2013.....	37
5. Tingkat Kesejahteraan KK di Kelurahan Korong Gadang Tahun 2012	37
6. Mata Pencarian Masyarakat Kelurahan Korong Gadang Tahun 2012.....	38
7. Jumlah Pendapatan Masyarakat Korong Gadang Berdasarkan usaha Tahun 2012.....	39
8. Lembaga Perekonomian yang Ada di Kelurahan Korong Gadang Tahun 2012.....	40
9. Deskripsi Ringkas Profil KWT Lestari Padi Rimbun	46
10. Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Setiap Alur Pelaksanaan Program KRPL di KWT Lestari Padi Rimbun	49
11. Rencana kegiatan dan Kebutuhan Anggota	54
12. Perbandingan Juknis dengan Pelaksanaan di Lapangan	61
13. Kunjungan BKP ke lokasi KWT Lestari Padi Rimbun selama kegiatan KRPL	67
14. Pelaksanaan Peran BKP dalam kegiatan KRPL di KWT Lestari Padi Rimbun.....	68
15. Pelaksanaan Peran BPTP dalam kegiatan KRPL di KWT Lestari Padi Rimbun.....	69
16. Pelaksanaan Peran Dispernakbunhut dalam kegiatan KRPL di KWT Lestari Padi Rimbun	72
17. Pelaksanaan Peran Lurah Korong Gadang dalam kegiatan KRPL di KWT Lestari Padi Rimbun	73
18. Pelaksanaan Peran penyuluh pertanian dalam kegiatan KRPL di KWT Lestari Padi Rimbun	76
19. Pelaksanaan Peran KWT Lestari Padi Rimbun dalam kegiatan KRPL	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Analisis Pemangku Kepentingan dan Alur Lingkar Operasionalisasi Program Pembangunan Pertanian.....	20
2. Eksistensi Pemangku Kepentingan dalam Lingkaran Implementasi Program Pembangunan Pertanian.....	21
3. Struktur Organisasi KWT Lestari Padi Rimbun Periode 2013- 2016	42
4. Alur Pelaksanaan Program KRPL Di KWT Lestari Padi Rimbun.....	48
5. Alur Peran BPTP dalam Program KRPL	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pencapaian Skor PPH Kota Padang di Wilayah P2KP Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Program KRPL	83
2. Pelaksanaan KRPL Sumatera Barat Tahun 2012	84
3. Kelompok Pelaksana P2KP dan KRPL.....	85
4. Luas Lahan Pekarangan di Kota Padang Tahun 2013	87
5. Pelaksana dan Peran dalam kegiatan KRPL	88
6. SK Kelompok Wanita Tani Lestari Padi Rimbun.....	89
7. Sarana yang Diterima Anggota Berdasarkan RKKA.....	92
8. Dokumentasi Penelitian	103
9. Panduan Wawancara Untuk Informan Kunci	105

**PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN
LESTARI (KRPL) DI KELURAHAN KORONG GADANG
KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG**

ABSTRAK

Pelaksanaan Program KRPL melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan, namun dalam pelaksanaannya diduga tidak semua pemangku kepentingan berperan aktif dalam KRPL. Untuk menjawab masalah tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta mendeskripsikan peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program KRPL di Kelompok Wanita Tani (KWT) Lestari Padi Rimbun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, lebih spesifiknya menggunakan metode studi kasus. Untuk mencapai tujuan penelitian maka data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tahapan pelaksanaan Program KRPL di KWT Lestari Padi Rimbun dimulai dari persiapan program, pembentukan kelompok, sosialisasi program, perencanaan kegiatan, pelatihan, implementasi serta monitoring dan evaluasi. Tahapan program sesuai dengan petunjuk teknis, kecuali pada tahapan perencanaan kegiatan. Sementara kegiatan lainnya sesuai dengan petunjuk teknis. Berdasarkan pelaksanaan peran pemangku kepentingan dalam program KRPL didapatkan bahwa masing-masing pemangku kepentingan tidak melaksanakan semua perannya sesuai dengan petunjuk teknis. Disarankan agar pelaksanaan KRPL disesuaikan dengan petunjuk teknis KRPL dan untuk program selanjutnya sebaiknya tidak usah melibatkan banyak pemangku kepentingan agar program dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: *peran, pemangku kepentingan, program, KRPL, KWT*

**THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN KAWASAN RUMAH
PANGAN LESTARI (KRPL) PROGRAM IMPLEMENTATION
IN KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN
KURANJI, PADANG MUNICIPALITY**

ABSTRACT

Implementation of KRPL program involves several stakeholders, but it is suspected that not all of them participate actively. So this case study aims to describe the steps of KRPL program implementation at Kelompok Wanita Tani (KWT) Lestari Padi Rimbun and the role of stakeholders. The data were analyzed qualitatively by describing the phenomenon. The result showed that the steps of KRPL program implementation at KWT Lestari Padi Rimbun started from program preparation, groups formation, socialization, planning, training, implementation, monitoring and evaluation. Almost all steps are congruent with program guideline except the program planning. However, each stakeholder did not play its role as mandated in program guideline. Based on the findings, It is suggested that the program had to be implemented in line with the guideline. The programs should be formulated with as less possible as stakeholders for simpler implementation.

Key words: role, stakeholders, program, KRPL, KWT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Namun, keadaan pertanian Indonesia sendiri tidak mengalami kemajuan yang nyata. Akibatnya adalah kehidupan penduduk (petani) tidak pernah meningkat kualitas atau kesejahteraannya. Dalam rangka meningkatkan pertanian dan kondisi kehidupan petani, pemerintah melaksanakan berbagai program dan strategi dalam bidang pertanian. Akan tetapi program dan strategi pembangunan pertanian tersebut belum maksimal dan bahkan kurang berkembang karena banyak masalah yang dihadapi dalam perjalanannya. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian yaitu: (1) teknologi, (2) birokrasi dan kelembagaan, serta (3) permodalan (Banowati dan Sriyanto, 2013: 122-125).

Menurut Mosher (1965: 78-156), pembangunan pertanian tidak dapat dilaksanakan hanya oleh petani sendiri. Ada beberapa persyaratan untuk mencapai pembangunan pertanian, syarat pokok berupa: (1) pasar untuk hasil usahatani, (2) teknologi yang selalu berubah, (3) tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal, (4) perangsang produksi bagi petani dan (5) pengangkutan. Syarat yang kedua berupa syarat pelancar, yaitu: (1) pendidikan pembangunan, (2) kredit produksi, (3) kegiatan bersama oleh petani (4) perbaikan dan perluasan tanah pertanian dan (5) perencanaan nasional pembangunan pertanian.

Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tidak dapat dilepaskan dari ketatalaksanaan program atau kegiatan, dimana secara konseptual program diformulasikan untuk rancangan pembangunan yang selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan. Namun seiring penerapan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, konsep pelaksanaannya diarahkan pada perluasan peran pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan, sementara itu peran pemerintah pusat lebih difokuskan pada koordinasi dan pembinaan (Iqbal, 2007: 89-90).

Salah satu program pembangunan pertanian yaitu adanya konsep ketahanan pangan. Ketahanan pangan (*food security*) mengandung dua unsur pokok, yaitu “ketersediaan pangan” dan “aksesibilitas masyarakat” terhadap pangan tersebut. Salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Ketersediaan dan kecukupan pangan mencakup kuantitas dan kualitas bahan pangan agar setiap individu dapat terpenuhi standar kebutuhan kalori dan energi untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Salah satu cara yang ditempuh untuk penyediaan pangan adalah melalui produksi sendiri, dengan cara memanfaatkan dan alokasi sumber daya alam, manajemen dan pengembangan sumber daya manusia, serta aplikasi dan penguasaan teknologi yang optimal (Arifin, 2001: 50-51).

Konsep ketahanan pangan selalu identik dengan ukuran kemandirian pangan, yakni terpenuhinya kebutuhan pangan nasional atau kawasan secara mandiri dengan memberdayakan modal manusia, sosial dan ekonomi (termasuk lahan pekarangan dan pertanian serta sekitarnya) yang dimiliki, dan berdampak kepada peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat atau petani. Kemandirian pangan hanya dapat terwujud jika pembangunannya dilaksanakan atas dasar partisipatif aktif masyarakatnya sendiri sebagai bentuk kesadaran untuk membangun ketahanan pangan yang andal (BPTP Jawa Timur, 2012: 1).

Salah satu misi dari Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 adalah mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan. Implementasi dari misi tersebut ialah dengan dilaksanakannya Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), dengan tujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik wilayah (Kementerian Pertanian, 2013).

Sebagai bentuk keberlanjutan program P2KP Berbasis Sumberdaya Lokal tahun 2010, pada tahun 2013 program P2KP diimplementasikan melalui kegiatan: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L),

serta (3) Sosialisasi dan Promosi P2KP. Melalui tiga kegiatan besar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang baik (Kementrian Pertanian, 2013: 3).

Keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok makanan. PPH adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi budaya, agama dan cita rasa (Badan Ketahanan Pangan Kota Padang, 2013).

Menurut Laporan Badan Ketahanan Pangan Kota Padang, skor PPH diwilayah P2KP sebelum dan sesudah pelaksanaan Program P2KP masih jauh dibawah skor ideal (Lampiran 1). Melalui Pelaksanaan program P2KP telah meningkatkan skor PPH, walaupun belum mampu mencapai skor idealnya. Pelaksanaan program P2KP perlu ditingkatkan, khususnya melalui salah satu strategi P2KP yaitu KRPL.

KRPL adalah percontohan pemanfaatan pekarangan secara optimal dengan berbagai jenis tanaman maupun ternak dan ikan secara lestari untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Tujuannya adalah (1) memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga/masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari, (2) meningkatkan kemampuan keluarga/masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan di perkotaan maupun pedesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran, dan tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan serta diversifikasi pangan (3) mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan (4) mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta (5) menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri (BPTP Sumatera Barat, 2012).

Pelaksanaan Program KRPL melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan tersebut yaitu Badan Ketahanan

Pangan (BKP), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Dispernakbunhut, Lurah, Penyuluh Pertanian Lapangan Lokasi dan Kelompok Wanita Tani. Pihak yang berkepentingan tersebut memiliki peran masing-masing dalam keberhasilan program.

Mitchell *dkk* (1997) *dalam* Sundawati dan Sanudin (2009: 103), mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan menurut Fletcher *dkk* (2003) *dalam* Sundawati dan Sanudin (2009: 103), secara singkat mendefinisikan pemangku kepentingan merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Para pemangku kepentingan ini sering diidentifikasi dengan pertimbangan tertentu, yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif mereka terhadap isu atau posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka.

Menurut Iqbal (2007: 90) implementasi program pembangunan pertanian selama ini dapat dikatakan cenderung menjadi ranahnya para pemangku kepentingan utama yang secara signifikan berpengaruh atau memiliki posisi penting atas keberlangsungan kegiatan pembangunan tersebut. Pemangku kepentingan demikian dapat digolongkan sebagai pihak penyandang dana, pelaksana kegiatan, organisasi pengawas dan advokasi, yang secara implisit adalah pemerintah. Sementara itu, peran pemangku kepentingan lainnya yang terkena dampak, baik positif (penerima manfaat) maupun negatif (di luar kesukarelaan) dari suatu kegiatan, relatif kurang dilibatkan.

B. Rumusan Masalah

Tahun 2012, BPTP Sumatera Barat mengembangkan lokasi KRPL pada 13 kota/kabupaten (Lampiran 2). Berdasarkan Panduan Teknis KRPL tahun 2014, Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan menerapkan Konsep KRPL dilaksanakan di 1950 desa baru pada tahun 2014 dan 4748 desa lama lanjutan tahun 2013 berada di 484 kabupaten atau kota pada 33 provinsi di Indonesia.

Sebelumnya KRPL telah dilakukan percontohan sejak tahun 2011 di Sumatera Barat. Percontohan ini dilaksanakan di tiga lokasi dalam tiga kota, yaitu: (1) di Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, (2)

Kelurahan Payobasung Kota Payakumbuh dan (3) Kelurahan Talawi Mudiak Kota Sawahlunto. Sesuai dengan kebijakan Badan Litbang Pertanian tahun 2012, KRPL diperluas lokasinya di Indonesia termasuk Sumatera Barat (BPTP Sumatera Barat, 2012: 2).

Badan Ketahanan Pangan Kota Padang menyebutkan, bahwa Kota Padang menempatkan sektor industri, perdagangan dan jasa menjadi andalan dibandingkan dengan sektor pertanian dalam mendorong perekonomian masyarakatnya. Hal ini terjadi karena transformasi ekonomi kota cenderung mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri. Berdasarkan hal tersebut peluang pengembangan KRPL di Kota Padang menjadi semakin besar guna membantu perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan lahan pekarangan.

Program KRPL di Kota Padang dimulai pada akhir tahun 2011 yaitu di Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan. Tahun 2012, selain dilanjutkan di Kelurahan Tarantang, KRPL juga dikembangkan di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah. Hingga tahun 2014 perkembangan KRPL di Kota Padang menjadi semakin luas (Lampiran 3) yang tersebar dalam beberapa Kelurahan.

Kecamatan Kuranji merupakan salah satu wilayah pengembangan KRPL di Kota Padang. Peluang pengembangan KRPL di kecamatan ini lebih besar dari pada kecamatan lainnya di Kota Padang, karena memiliki potensi lahan pekarangan yang cukup luas (Lampiran 4). Salah satu Kelurahan yang menjadi target pengembangan KRPL tahun 2013 adalah Kelurahan Korong Gadang dengan satu Kelompok Wanita Tani (Lampiran 3).

Kelompok Wanita Tani Lestari Padi Rimbun merupakan kelompok yang mengembangkan KRPL tahun 2013. Kelompok ini mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program dari Kementerian Pertanian tersebut, hal ini dikarenakan anggota yang memiliki kemauan dalam penerapan KRPL di pekarangan rumah mereka. KWT Lestari Padi Rimbun telah mampu menjual hasil dari tanaman yang mereka budidayakan di pekarangan rumah mereka. Selain itu KWT Lestari juga ikut dalam melakukan berbagai macam pelatihan dan pertemuan dalam rangka pelaksanaan KRPL.

KRPL dilaksanakan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan instansi terkait baik ditingkat pusat maupun daerah, yang masing-masing bertanggung jawab terhadap keberhasilan program. Semua elemen tersebut memiliki peran dan tanggung jawabnya dalam kegiatan KRPL (Lampiran 5). Namun dalam pelaksanaannya menurut penyuluh pertanian lapangan di lokasi, tidak semua elemen dan instansi terkait aktif dalam menyukseskan keberhasilan program. Berdasarkan wawancara dengan penyuluh lapangan, instansi yang diduga aktif dalam mendukung pelaksanaan program KRPL yaitu Dispernakbunhut Kota Padang, Badan Ketahanan Pangan Kota Padang dan Lurah Korong Gadang.

Dari uraian diatas, jelas bahwa untuk menyukseskan program pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran semua pemangku kepentingan sebagai fasilitator, pendamping, pembina, pengawas dan koordinator yang dapat menggerakkan masyarakat untuk keberhasilan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Pentingnya keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan dalam program KRPL di Kota Padang, maka peneliti melakukan penelitian tentang **Peran Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang.**

Dari perumusan masalah diatas dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari pada Kelompok Wanita Tani Lestari Padi Rimbun di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang ?
2. Bagaimana peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari pada Kelompok Wanita Tani Lestari Padi Rimbun di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari pada Kelompok Wanita Tani Lestari Padi Rimbun di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang.

2. Mendeskripsikan peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari pada Kelompok Wanita Tani Lestari Padi Rimbun di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi dunia akademik, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perencanaan dan evaluasi program pembangunan pertanian.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan gambaran mengenai program KRPL serta peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program tersebut.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pengalaman serta acuan penelitian di masa mendatang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Pertanian

Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu: (1) memberikan perhatian terhadap kapasitas, terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan, (2) ia mencakup keadilan, perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya, (3) penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa hanya masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan, dan (4) pembangunan berarti perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya (Bryant dan Lousie, 1987: 22).

Pembangunan di negara yang sedang berkembang pada umumnya dititik beratkan pada sektor pertanian guna memperbaiki mutu makanan penduduknya dan untuk memebuhi kebutuhan bahan pangan secara nasional. Terdapat enam komponen fungsional yang saling berkaitan satu terhadap yang lain dan tidak dapat saling dipisahkan. Komponen fungsional tersebut adalah: (1) komponen produksi. Komponen produksi ini biasanya berhubungan dengan tugas fisik dalam penanaman tanaman, perikanan ataupun meningkatkan usaha peternakan, (2) komponen sarana produksi pertanian dan kredit. Hal ini berkaitan dengan penyediaan input fisik berupa bibit, agro kimia, dan biaya kerja, (3) komponen pemasaran. Kegiatan pemasaran melibatkan proses penyimpanan hasil produksi, pengangkutan, dan penjualan hasil produksi, (4) komponen penelitian. Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh fakta baru tentang kegiatan usaha dibidang petanian, (5) komponen penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dimaksudkan untuk melaksanakan alih pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari peneliti kepada para produsen, (6) komponen peraturan. Peraturan ini biasanya dibuat oleh pemerintah dalam usaha meningkatkan hasil produksi pertanian dengan melakukan pengaturan terhadap pengalokasian sumber-sumber daya yang tersedia

baik sumber daya alam seperti tanah dan air, sumber daya manusia dan lainnya (Suhardiyono, 1992: 81).

Pembangunan pertanian adalah suatu perubahan yang terencana dan bertahap dalam sektor pertanian dengan tujuan meningkatkan produksi pertanian secara kuantitas dan kualitas agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk yang terus menerus meningkat pada umumnya dan meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya melalui peningkatan produktivitas usaha tani dengan menerapkan teknologi baru pertanian (Nurmala dkk, 2012: 153). Menurut Banoewidjojo (1983: 24) dalam rangka pembangunan pertanian, titik berat segenap kegiatan ditujukan kepada orang-orang agar masing masing dengan mudah mengubah diri sendiri menjadi lebih pandai, lebih terampil, dan lebih bersemangat sehingga usahanya menjadi terus menerus lebih maju dan dinikmati demi peningkatan kesejahteraannya sendiri.

Menurut Mosher (1965: 78-156), pembangunan pertanian tidak dapat dilaksanakan hanya oleh petani sendiri. Ada beberapa persyaratan yang untuk mencapai pembangunan pertanian, syarat pokok berupa : (1) pasar untuk hasil usahatani, (2) teknologi yang selalu berubah, (3) tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal, (4) perangsang produksi bagi petani, dan (5) pengangkutan. Syarat yang kedua berupa syarat pelancar, yaitu: (1) pendidikan pembangunan, (2) kredit produksi, (3) kegiatan bersama oleh petani (4) perbaikan dan perluasan tanah pertanian dan (5) perencanaan nasional pembangunan pertanian.

Dalam paradigma pertanian untuk pembangunan dipahami bahwa pembangunan pertanian diarahkan untuk (1) membangun sumberdaya insani yang unggul dan menjaga stabilitas nasional melalui penjaminan ketahanan pangan, ketahanan penghidupan dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, dan (2) menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang menyediakan produk-produk hulu berbasis kekayaan keanekaragaman hayati tinggi yang menjadi tulang punggung berkembangnya sektor-sektor hilir ekonomi nasional yang berkelanjutan (Kementrian Pertanian, 2014: 3).

Menurut Banwati dan Sriyanto (2013: 89-90) ditinjau dari prespektif pembangunan pertanian secara lebih luas, maka pembangunan pertanian setidaknya perlu mnedapat perhatian yang memadai: (1) adanya keyakinan bahwa

sektor pertanian memiliki kemampuan untuk menghasilkan surplus, (2) macam produksi pertanian dapat diermudah yaitu dengan teknologi, produktivitas pertanian menjadi besar khususnya dibidang pangan.

Reijntjes, Haverkort dan Bayer (1999: 2) menyebutkan dalam program pembangunan sekarang ini dikenal secara meluas istilah keberlanjutan. Keberlanjutan dapat diartikan menjaga agar suatu upaya terus berlangsung. Dalam konteks pertanian, keberlanjutan pada dasarnya berarti kemampuan untuk tetap produktif sekaligus tetap mempertahankan basis sumberdaya. Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumberdaya alam.

Reijntjes *dkk* (1999: 2-3) menyatakan bahwa pertanian bisa dikatakan berkelanjutan jika mencakup hal- hal:

1. Mantap secara ekologis, yang berarti bahwa kualitas sumberdaya alam dipertahankan dan kemampuan agroekosistem secara keseluruhan dari manusia, tanaman, dan hewan sampai organisme tanah ditingkatkan.
2. Bisa berkelanjutan secara ekonomis, yang berarti bahwa petani bisa cukup menghasilkan untuk pemenuhan kebutuhan atau pendapatannya sendiri, serta mendapatkan penghasilan yang mencukupi untuk mengembalikan tenaga dan biaya yang dikeluarkan.
3. Adil, sumberdaya dan kekuasaan didistribusikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar semua anggota masyarakat terpenuhi dan hak- haknya dalam penggunaan lahan, modal, bantuan teknis daat terjamin.
4. Manusiawi, yang berarti semua bentuk kehidupan dihargai. Martabat dasar makhluk hidup dihormati, dan hubungan serta institusi menggabungkan nilai kemanusiaan yang mendasar, seperti kepercayaan, kejujuran dan kerja sama.
5. Luwes, yang berarti bahwa masyarakat pedesaan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi usaha tani yang berlangsung terus.

B. Ketahanan Pangan

1. Konsep Ketahanan Pangan

Konsep ketahanan pangan selalu identik dengan ukuran kemandirian pangan, yakni terpenuhinya kebutuhan pangan nasional atau kawasan secara mandiri dengan memberdayakan modal manusia, sosial dan ekonomi (termasuk lahan pekarangan dan pertanian serta sekitarnya) yang dimiliki, dan berdampak kepada peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat atau petani. Kemandirian pangan hanya dapat terwujud jika pembangunannya dilaksanakan atas dasar partisipatif aktif masyarakatnya sendiri sebagai bentuk kesadaran untuk membangun ketahanan pangan yang andal (BPTP Jawa Timur, 2012).

Menurut Hanafie (2010: 270) pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk dalam jumlah, mutu, keragaman, kandungan gizi dan keamanannya, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Tujuan pembangunan ketahanan pangan bagi Indonesia akan lebih mudah dicapai jika didasarkan pada beberapa hal, antara lain :

- a. Penyediaan pangan berbasis pemanfaatan ketersediaan sumberdaya lokal, baik sumberdaya alam, manusia, teknologi dan sosial.
- b. Efisiensi ekonomi dengan tetap memperhatikan keunggulan kompetitif wilayah.
- c. Distribusi yang mengacu pada mekanisme pasar yang kompetitif.
- d. Perbaikan mutu dan konsumsi aneka ragam pangan.

FAO (1997) dalam Hanafie (2010: 272) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses, baik secara fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya dan rumah tangga tidak berisiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Ketahanan pangan bagi suatu negara merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi negara yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak seperti Indonesia.

Organisasi Pertanian dan Pangan PBB (FAO) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai sebuah kondisi dimana semua masyarakat dapat memperoleh pangan yang aman dan bergizi untuk dapat hidup secara sehat dan aktif. Disatu

sisinya, untuk menikmati ketahanan pangan harus ada sebuah ketetapan tentang pangan yang aman dan bergizi, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Sistem ketahanan pangan dikatakan mantap apabila mampu memberikan jaminan bahwa semua penduduk setiap saat pasti memperoleh makanan yang cukup sesuai dengan norma gizi untuk kehidupan yang sehat, tumbuh, dan produktif (Hanafie, 2010: 273).

2. Pekarangan dan Ketahanan Pangan

Menurut Nurmala dkk (2012: 106), pekarangan adalah lahan pertanian yang ada disekitar rumah, umumnya ada di depan rumah yang dibatasi oleh pagar tanaman hidup atau pagar mati yang mempunyai hubungan fungsional dengan rumah tempat tinggal. Pekarangan adalah lahan terbuka yang terdapat di sekitar rumah tinggal, jika lahan ini dipelihara dengan baik akan memberikan lingkungan yang menarik, nyaman dan sehat serta menyenangkan sehingga membuat seseorang betah tinggal dirumah (Alex, 2012: 3).

Nasution (1984) dalam Alex (2012: 5) menyebutkan bahwa pekarangan adalah sebidang tanah yang mempunyai batas yang terdapat di sekitar rumah dan pada umumnya dikerjakan sebagai usaha sampingan. Kegiatan penanaman di pekarangan ini biasanya dilakukan dalam jumlah yang sedikit dengan berbagai jenis tanaman, sehingga potensial untuk penganekaragaman pangan. Pekarangan yang ditata dengan aneka tanaman sayuran memiliki multi efek yaitu selain efek ekonomi juga estetika (Alex, 2012: 5).

Secara garis besar area atau daerah taman pekarangan dapat dibagi menjadi tiga bagian (Alex, 2012: 10-11):

1. Daerah umum (*public area*), merupakan taman yang dibuat pada area ini dapat dilihat dan dinikmati oleh penghuni rumah juga oleh siapa saja yang lewat disekitar pekarangan tersebut.
2. Daerah kesibukan (*service area*), dimana pada area ini dapat ditanam bumbu-bumbuan, sayur-sayuran, atau tempat menanam obat-obatan.
3. Daerah pribadi (*private area*), dimana taman yang dibuat khusus untuk pribadi seperti menanam tanaman yang merupakan hobi pemilik rumah.

4. Daerah famili (*family area*) daerah ini dibuat taman untuk kepentingan keluarga, tempat berkumpulnya keluarga.

Lahan pekarangan memiliki fungsi multiguna, karena dari lahan yang relatif sempit ini, bisa menghasilkan bahan pangan seperti umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, bahan tanaman rempah dan obat, bahan kerajinan tangan; serta bahan pangan hewani yang berasal dari unggas, ternak kecil maupun ikan. Manfaat yang akan diperoleh dari pengelolaan pekarangan antara lain dapat: memenuhi kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga, menghemat pengeluaran, dan juga dapat memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga (Badan Litbang Pertanian, 2011 *dalam* Astuti dan Wahyuni 2013).

Awalnya bertanam sayur di pekarangan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dengan memanfaatkan halaman rumah yang tersisa, sehingga kegiatan ini banyak di pedesaan. Namaun saat ini budaya bertanam sayuran di pekarangan ternyata juga disukai kalangan ibu rumah tangga di daerah perkotaan. Memang bukan untuk pemenuhan gizi keluarga yang jadi tujuan utamanya, melainkan lebih sekedar menyalurkan hobi. Kegiatan ini cukup bermanfaat terutama jika kebutuhan rempah atau sayuran yang mendesak (Alex, 2012: 2).

Menurut Satiadiredja (1978: 26-27) fungsi pekarangan adalah:

1. Penghasil makanan tambahan, yaitu tambahan pada makanan pokok. Makanan tambahan ini terdiri dari sayuran, umbi-umbian dan buah-buahan.
2. Pekarangan memberikan hasil setiap hari, sehingga menjadi sumber bahan makanan tetap.
3. Pekarangan menghasilkan rempah-rempah, obat-obatan, keperluan rumah tangga dan tanaman hias.
4. Pekarangan menghasilkan bahan-bahan bangunan, terutama bambu, yang banyak ditanam di pinggir pekarangan.
5. Pekarangan menghasilkan kayu bakar, baik dari pohon buah-buahan maupun dari kayu-kayuan.
6. Pekarangan menghasilkan bahan-bahan dasar untuk kerajinan tangan.
7. Pekarangan juga menghasilkan ternak dan itik.

Karena fungsinya yang sangat luas tersebut, pekarangan sering diberi julukan, seperti lumbung hidup, warung hidup, apotik hidup, taman sari, ataupun wisma sari. Ahli hidrologi memberinya nama *watershed*, ahli geografi menamakannya *biospher* dan ahli sosiologi menganggapnya sebagai usaha keluarga. Kedepannya pekarangan dapat berfungsi lebih yaitu dilakukan penanaman yang monokultur yang pada akhirnya menjadi kebun buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman hias (Alex, 2012: 6).

Keuntungan bertanam di pekarangan menurut Alex (2012: 12-13) yaitu:

1. Pekarangan sebagai penghasil pangan, obat-obatan serta ternak.
2. Pemanfaatan pekarangan merupakan bagian dari pembangunan hutan kota, guna lingkungan yang nyaman, sehat dan indah, sangat mendukung pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Jika setiap rumah mempunyai pekarangan yang indah serta terpelihara, akan meningkatkan pembangunan hutan kota yang berbentuk menyebar dengan struktur yang berstrata akan meningkatkan kualitas lingkungan yang sejuk, sehat, dan indah.
4. Dapat menyalurkan kreatifitas dan kesenangan ataupun hobi semua anggota keluarga.
5. Unsur utama pemanfaatan pekarangan adalah tanaman, apakah itu tanaman hortikultura, obat-obatan, bumbu-bumbuan, rempah-rempah dan lainnya.
6. Pemanfaatan pekarangan akan memberikan kenyamanan serta dapat memenuhi kebutuhan jasmaniah dan rohaniah terutama anggota keluarga.
7. Pemanfaatan mengandung nilai pendidikan.

C. Perencanaan Program Pembangunan Pertanian

Perencanaan dalam arti luas yaitu suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan- kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber- sumber pembangunan (termasuk sumber- sumber ekonomi) yang

terbatas, untuk mencapai tujuan- tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif (Tjokroamidjojo, 1979: 12).

Tjokroamidjojo (1979: 14-15) menambahkan bahwa ada lima hal pokok yang perlu diketahui dalam perencanaan pembangunan yaitu: (1) permasalahan-permasalahan pembangunan suatu masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan; (2) tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai; (3) kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber- sumbernya dan pemilihan alternatif-alternatifnya yang terbaik; (4) penterjemahan dalam program- program atau kegiatan- kegiatan usaha yang konkrit; dan (5) jangka waktu pencapaian tujuan.

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program. Semua program perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses, evaluasi manfaat dan evaluasi akibat (Wirawan, 2012: 17).

Perencanaan pembangunan harus memberi keleluasaan dan kesempatan yang luas kepada masyarakat dan *stakeholders*. Pelibatan masyarakat (*stakeholders*) tersebut sangat penting karena pada dasarnya pelaku utama pembangunan dalam sistem otonomi daerah adalah masyarakat. Dalam hal ini masyarakat bukan sebagai objek pembangunan tetapi sebagai subjek pembangunan daerahnya. Model perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dikenal dengan perencanaan partisipatif (Nurcholis dkk, 2009: 11).

Selanjutnya Nurcholis dkk (2009: 11) menambahkan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat. Masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencairan alternatif masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat dalam proses konversi, ikut memantau

implementasi dan ikut aktif melakukan evaluasi. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan dan terlibat secara utuh dalam perencanaan guna menentukan arah dan agenda pembangunan daerahnya sampai dengan evaluasinya.

Nurcholis dkk (2009: 12) menyebutkan bahwa nilai tambah yang diharapkan dari proses perencanaan partisipatif yaitu

1. Efisien yaitu partisipasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan, ketika sumberdaya serta kemampuan lokal dapat dipergunakan untuk menghindari tingginya biaya penggunaan sumberdaya dan kemampuan yang berasal dari luar. Jika masyarakat dilibatkan dari awal, maka kepentingan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi pada saat perencanaan.
2. Efektif yaitu partisipasi dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan pembangunan karena dengan terlibatnya masyarakat lokal yang lebih memahami kondisi, potensi serta permasalahannya maka kebutuhan lokal akan teridentifikasi dengan lebih akurat.
3. Menjalin kemitraan yaitu partisipasi dapat mendorong terwujudnya kemitraan antara berbagai pelaku pembangunan dengan didasarkan pada rasa saling percaya.
4. Meningkatkan kapasitas yaitu partisipasi dapat meningkatkan kapasitas para pelaku, khususnya dalam proses dialog dan pengelolaan pembangunan.
5. Memperluas ruang lingkup, dimana partisipasi dapat memperluas ruang lingkup kegiatan pembangunan. Masyarakat akan memahami tanggung jawabnya dan akan berusaha mengembangkan aktivitas pembangunan tersebut.
6. Meningkatkan ketepatan kelompok sasaran dimana partisipasi dapat meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi kelompok sasaran dari berbagai program pembangunan.
7. Berkelanjutan, dimana partisipasi akan mendorong berkelanjutannya berbagai aktivitas pembangunan karena masyarakat akan mempunyai

rasa memiliki dan ikut serta menjaga proses maupun hasil dari pembangunan itu sendiri.

D. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Mitchell dkk (1997) dalam Sundawati dan Sanudin (2009: 103), mendefinisikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan menurut Fletcher dkk (2003) dalam Sundawati dan Sanudin (2009: 103), secara singkat mendefinisikan pemangku kepentingan merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Para pemangku kepentingan ini sering diidentifikasi dengan pertimbangan tertentu, yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif mereka terhadap isu atau posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka.

Stakeholders adalah para pihak yang terkait dan berkepentingan terhadap program. *Stakeholders* dapat dibedakan menjadi *stakeholders* internal dan eksternal. *Stakeholders* internal antara lain unit-unit pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan pelayanan publik, mulai dari unsur kepala daerah, SKPD, serta unit pelaksana. *Stakeholders* eksternal antara lain kelompok sasaran yaitu masyarakat yang berhak menerima pelayanan publik; lembaga swadaya masyarakat (LSM, asosiasi profesi, lembaga keagamaan, dan sejenisnya, *community-based organization* (kelompok atau wakil warga terkait pelayanan, kelompok sasaran) (USAID: 2009: 25-26).

Dalam implementasi program pembangunan, pemangku kepentingan memiliki definisi dan pengertian yang beraneka ragam. Istilah pemangku kepentingan digunakan untuk mendeskripsikan komunitas atau organisasi yang secara permanen menerima dampak dari aktivitas atau kebijakan, dimana mereka berkepentingan terhadap hasil aktivitas atau kebijakan tersebut. Hal ini perlu disadari, mengingat masyarakat tidak selalu menerima dampak secara adil. Sebagian masyarakat lainnya justru memperoleh manfaat dari suatu kegiatan atau kebijakan (Race dan Millar, 2006 dalam Iqbal (2007: 90).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 2 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para

pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Ada tiga golongan pemangku kepentingan yang merupakan pilar penunjang pembangunan di daerah yaitu pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Pembangunan yang berhasil dan berkesinambungan akan terwujud jika diantara ketiga komponen pembangunan tersebut mau dan mampu bekerjasama secara harmonis (Wayan, 2011: 63).

Para pemangku kepentingan yang ada di sektor pemerintahan, hendaknya dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan bahwa proses perencanaan harus dilakukan secara partisipatif, responsif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada lembaga yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka telah menunjukkan bahwa mereka telah membuat perbaikan pada masyarakatnya, terbangun hubungan sosial yang semakin kuat, dan meningkatnya rasa percaya diri baik secara individu maupun kolektif (Florin dan Wandersman, 1990 *dalam* Wayan, 2011: 63).

Menurut Iqbal (2007: 90), dalam konteks sektor pertanian secara organisasi pemangku kepentingan dapat dikategorikan dalam lingkup yang lebih luas, yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan komunitas. Secara perorangan atau kelompok, pemangku kepentingan mencakup aparat pemerintah (lingkup nasional hingga lokal), peneliti, penyuluh, petani (kontak tani, pemilik, penggarap, buruh tani), pedagang (sarana produksi dan hasil pertanian), penyedia jasa (alsintan dan transportasi), dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Sedangkan menurut Mosler (2004: 5) pemangku kepentingan adalah semua orang yang kepentingannya dipengaruhi oleh sistem (proyek) dan mereka yang kegiatannya secara signifikan mempengaruhi sistem.

Friedman dan Miles (2006) *dalam* Kadir (2014: 51) mengemukakan tujuh prinsip dalam mengelola *stakeholders* yaitu: (1) mengakui dan memperhatikan kepentingan *stakeholders* dalam pengambilan keputusan, (2) menjalin komunikasi secara terbuka terkait kepentingan *stakeholders*, serta menganalisis resiko yang mungkin terjadi akibat keterlibatannya, (3) mengadopsi cara berperilaku dan kemampuan masing-masing *stakeholders*, (4) mengakui saling ketergantungan dan berusaha untuk mencapai distribusi yang adil atas manfaat dan beban diantara

stakeholders, dengan mempertimbangkan resiko dan kerentanan masing- masing, (5) bekerjasama dengan entitas lain untuk memastikan bahwa resiko dan bahaya yang timbul dapat diminimalkan, (6) menghindari kegiatan yang membahayakan hak asasi manusia atau menimbulkan resiko yang tidak dapat diterima *stakeholders*, dan (7) mengakui potensi konflik akibat adanya peran dan tanggung jawab *stakeholders*, dan mengatasinya melalui komunikasi yang terbuka.

Crosby (1992) dalam Iqbal (2007: 90) menyebutkan bahwa secara garis besar, pemangku kepentingan dapat dibedakan atas tiga kelompok, yaitu: (1) pemangku kepentingan utama, yakni yang menerima dampak positif atau negatif dari satu kegiatan, (2) pemangku kepentingan penunjang, adalah yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan. Mereka dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti organisasi pemerintahan, LSM, dan pihak swasta. Serta (3) pemangku kepentingan kunci, yakni yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan.

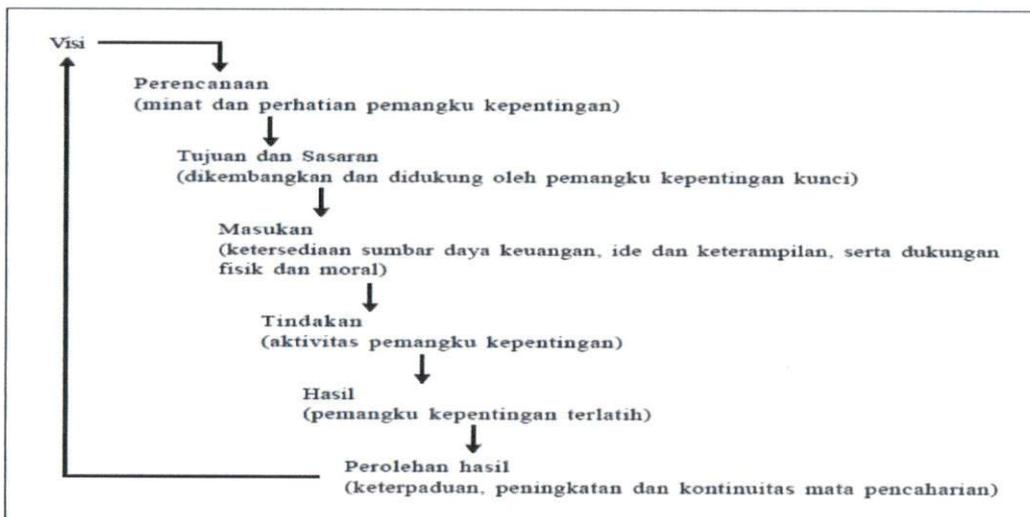
Berdasarkan keterkaitannya terhadap suatu keputusan atau suatu kegiatan, Townsley (1998) dalam Kadir (2014: 50) kemudian membedakan *stakeholders* menjadi dua yaitu *stakeholders* primer dan *stakeholders* sekunder. *stakeholders* primer adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu sumberdaya, baik sebagai mata pencaharian ataupun terlibat langsung dalam eksploitasi. *stakeholders* sekunder adalah pihak yang memiliki minat atau kepentingan secara tidak langsung, atau pihak yang tergantung pada sebagian kekayaan atau bisnis yang dihasilkan oleh sumberdaya.

Reed dkk (2009) dalam Roslinda, Darusman, Suharjito, dan Ridho (2012: 80) mengelompokkan pemangku kepentingan berdasar pengaruh dan kepentingannya sebagai *subjects*, *key players*, *crowd*, dan *context setters*. *Subject* memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Walaupun mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Pemangku kepentingan ini dapat menjadi berpengaruh jika membentuk aliansi dengan pemangku kepentingan lainnya. *Key players* merupakan pemangku kepentingan yang aktif karena mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek. *Crowd* merupakan pemangku kepentingan

yang memiliki sedikit kepentingan dan berpengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikut sertakannya dalam pengambilan keputusan. *Context setter* memiliki pengaruh yang tinggi tapi sedikit kepentingan sehingga dapat menjadi risiko signifikan untuk dipantau.

Beberapa faktor kendala yang harus dihindari dan dikelola guna memperlancar implementasi program pembangunan pertanian. Faktor-faktor tersebut antara lain berkaitan dengan waktu dan dana, dominasi dan perbedaan pendapat para pemangku kepentingan, ketersediaan informasi, keterampilan instruktur pelatihan dan kemacetan implementasi kegiatan. Oleh karena itu perlu diperhatikan dan dipahami beberapa aspek seperti visi, perencanaan, tujuan dan sasaran, masukan, tindakan, hasil dan perolehan hasil operasionalisasi kegiatan pembangunan pertanian (Gambar 1) (Iqbal, 2007: 93-94).

Gambar 1. Analisis pemangku kepentingan dan alur lingkaran operasionalisasi program pembangunan pertanian.

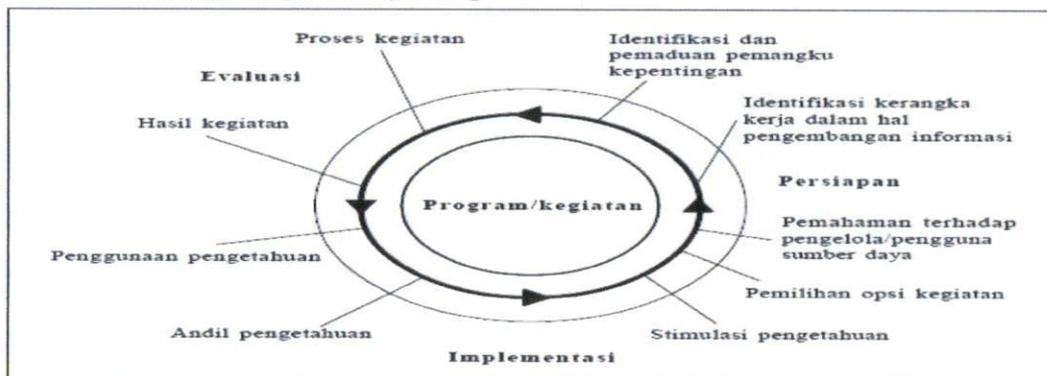


Sumber: Iqbal, 2007: 94

Gambaran mengenai proses pembelajaran dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi program pembangunan pertanian (Gambar 2). Proses tersebut meliputi: (1) persiapan (identifikasi dan pemaduan pemangku kepentingan, identifikasi kerangka kerja dalam hal pengembangan informasi, pemahaman terhadap pengelola dan pengguna sumberdaya, dan pemilihan opsi kegiatan), (2) implementasi (andil, penggunaan, dan stimulasi pengetahuan), (3)

evaluasi terhadap proses dan perolehan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian (Arthur dan Garaway, 2005 dalam Iqbal, 2007: 93-94).

Gambar 2. Eksistensi pemangku kepentingan dalam lingkaran implementasi program pembangunan pertanian



Sumber: Arthur dan Garaway, 2005 dalam Iqbal, 2007: 93-94

E. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

1. Gambaran Umum Program

Pada acara Konferensi Dewan Ketahanan Pangan di Jakarta pada Bulan Oktober 2010, Presiden RI. S.B.Yudhoyono, menyatakan bahwa ketahanan dan kemandirian pangan nasional harus dimulai dari tingkat rumah tangga. Hasil kajian Saliem *dkk* (2001) mengemukakan bahwa walaupun ketahanan pangan tingkat wilayah/regional (provinsi) tergolong ketahanan pangan terjamin, namun di wilayah yang bersangkutan masih ditemukan rumah tangga rawan pangan dengan proporsi yang relatif tinggi. Kondisi demikian dapat dikatakan bahwa persediaan pangan yang cukup di tingkat wilayah tidak selalu mencerminkan terjaminnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah tersebut. Salah satu faktor penyebab adalah kurangnya akses rumah tangga yang bersangkutan terhadap pangan karena lemahnya daya beli masyarakat, sehingga tidak dapat memenuhi konsumsi pangan sesuai anjuran (Purwantini, Saptana dan Suharyono, 2012: 241).

Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) merupakan implementasi dari Rencana Straegis Kementerian Pertanian yaitu empat sukses pertanian, salah satunya ialah mengenai Peningkatan Diversifikasi Pangan, yang merupakan salah satu kontrak kerja Menteri Pertanian

dengan Presiden RI pada tahun 2009-2014, dengan tujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai karakteristik wilayah. Program P2KP diimplementasikan melalui beberapa kegiatan salah satunya program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, 2013).

Kementrian Pertanian merancang sebuah konsep yang dinamakan Kawasan Rumah Pangan Lestari disingkat KRPL. Prinsipnya adalah penataan pekarangan dengan berbagai jenis tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, tanaman rempah dan obat, maupun ternak dan ikan. Hal ini berpatokan kepada potensi luas lahan pekarangan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal yang luasnya diseluruh tanah air mencapai 10,3 juta hektar. Selanjutnya Badan Litbang Pertanian menyusun program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (BPTP Sumbar, 2012).

Menurut Badan Litbang tahun 2011 dalam petunjuk teknis KRPL 2012, secara umum KRPL bertujuan untuk (1) memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari, (2) meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan di perkotaan maupun pedesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sauran, dan tanaman obat keluarga, pemeliharaan ternak dan ikan serta diversifikasi pangan, (3) mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan, (4) mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara murni.

2. Pelaksanaan Kegiatan

a. Persiapan

Tahap persiapan yaitu: (1) Pengumpulan informasi awal tentang potensi sumberdaya, lokasi dan kelompok sasaran (2) koordinasi dengan dinas terkait untuk mencari kesepakatan dalam penentuan calon kelompok sasaran dan lokasi (3) memilih pendamping yang menguasai teknik pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.

b. Sosialisasi

Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dan membuat kesepakatan awal untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan pada kelompok sasaran dan pemuka masyarakat serta petugas pelaksana dari instansi terkait.

c. Pembentukan kelompok

Kelompok sasaran adalah rumah tangga atau kelompok rumah tangga dalam satu Rukun Tetangga, Rukun Warga atau satu Kelurahan/Desa/Nagari. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif, dengan melibatkan kelompok sasaran, tokoh masyarakat, dan perangkat desa/nagari. Kelompok dibentuk dari, oleh, dan untuk kepentingan para anggota kelompok itu sendiri. Dengan cara berkelompok akan tumbuh kekuatan berinisiatif dari para anggota dengan prinsip keserasian, kebersamaan dan kepemimpinan dari mereka sendiri.

d. Penguatan Kelembagaan kelompok

Dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok: (1) mengambil keputusan bersama melalui musyawarah (2) menaati keputusan yang telah ditetapkan bersama, (3) memperoleh dan memanfaatkan informasi,(4) bekerjasama dalam kelompok, dan (5) bekerja dengan aparat maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

e. Perencanaan Kegiatan

Melakukan perencanaan/rancang bangun pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam berbagai tanaman pangan, sayuran, toga, buah-buahan, ikan dan ternak, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan, kebun bibit desa, serta pengelolaan limbah rumah tangga. Selain itu, dilakukan juga penyusunan rencana kerja untuk satu tahun. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan kelompok dan instansi terkait.

f. Pelatihan

Pelatihan dilakukan sebelum atau saat pelaksanaan di lapangan. Jenis pelatihan yang dilakukan diantaranya: teknik budidaya tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, toga, teknik budidaya ikan dan ternak, perbenihan

dan pembibitan, pengolahan hasil dan pemasaran serta teknologi pengolahan limbah rumah tangga. Jenis pelatihan lainnya yaitu penguatan kelembagaan.

g. Pelaksanaan/implementasi

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh kelompok dengan pengawalan teknologi oleh peneliti dan pendampingan antara lain oleh penyuluh dan petani andalan. Secara bertahap, pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menuju pada pencapaian kemandirian pangan rumah tangga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, konservasi tanaman pangan untuk masa depan, pengelolaan kebun bibit desa, dan peningkatan kesejahteraan.

h. Pembiayaan

Bersumber dari kelompok, masyarakat, partisipasi pemerintah daerah dan pusat, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta dan dana lainnya.

i. Monitoring dan evaluasi

Dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan kawasan, dan menilai kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan.

F. Kelompok Wanita Tani

Dewasa ini, dalam proses pembangunan banyak menggunakan kelompok sebagai media untuk mencapai tujuan pembangunan. Di daerah pedesaan berkembang kelompok- kelompok seperti kelompok masyarakat, kelompok tani, kelompok pemuda, kelompok ibu- ibu, kelompok usaha, dan sebagainya. Kelompok tani sudah berkembang secara kuantitas. Pada tahun 1993, tercatat ada 250.000 kelompok tani. Saat ini, kelompok tani ada hampir di setiap desa (Samsi, 2011: 1-2).

Kelompok adalah kumpulan orang- orang yang bergaul (berinteraksi) satu sama lain secara teratur dalam periode waktu serta menganggap diri mereka saling bergantung dalam kaitannya dengan pencapaian satu tujuan bersama atau lebih. Saat keberadaan tujuan bersama diakui, maka prosedur- prosedur untuk mencapai tujuan akan dirumuskan, peran tugas khusus untuk setiap orang

ditentukan, norma- norma akan berkembang untuk mengatur perilaku dan satu atau lebih pemimpin akan muncul (Wexley dan Yuki, 2005: 162- 163).

Wexley dan Yuki (2005: 163) membagi kelompok menjadi dua jenis yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah suatu sub unit organisasi yang resmi yang didirikan dengan anggaran dasar organisasi atau dengan surat keputusan manajer. Sedangkan kelompok informal biasanya terbentuk bila orang- orang bekerja saling berdekatan satu sama lain atau sering bergaul dalam pekerjaannya. Keanggotaan dalam kelompok informal memberikan kesempatan untuk memuaskan kebutuhan- kebutuhan sosial.

Pengembangan sumberdaya manusia pertanian dinilai sangat penting karena dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, akan mampu mengatasi problema pertanian yang penuh resiko tidak hanya dalam peningkatan produksi, tetapi juga dalam peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha pertanian. Dengan demikian di Indonesia kegiatan pembangunan pertanian banyak ditekankan melalui upaya pemberdayaan sumberdaya manusia, upaya ini dilakukan melalui pendekatan kelompok. Oleh karena itu, para penyuluh pertanian membentuk dan mengembangkan kelompok- kelompok tani sebagai wadah belajar dan beragam kegiatan dibidang pertanian (Samsi, 2011: 4).

Menurut peraturan Kementrian Pertanian tahun 2013, kelompok tani (poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usahataniya dan meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya.

Kelompok tani pada dasarnya merupakan kelembagaan petani non formal di pedesaan yang memiliki ciri dan fungsi. Ciri dari kelompok tani yaitu: (1) saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota; (2) mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani; (3) memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau/ pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya, adat istiadat, bahasa serta ekologi.

Sedangkan fungsi kelompok tani yaitu: sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan sebagai unit produksi (Kementrian Pertanian, 2013).

Faktor eksternal dan faktor internal sangat mempengaruhi keaktifan atau kurang berhasil sebagai unit belajar, unit kerjasama, unit produksi, maupun unit usaha dari sebuah kelompok. Faktor eksternal kelompok yang dapat berpengaruh adalah penyuluhan pertanian dan pembinaa oleh pamong desa. Ini terjadi karena penyuluh dan pamong desa merupakan sumber inovasi pertanian dan pembinaan organisasi. Sedangkan faktor internal kelompok yang dapat berpengaruh antara lain motivasi kerja anggota, keyakinan diri mampu berhasil, sikap anggota terhadap profesi petani, kohesi anggota, interaksi anggota, norma kelompok, serta gaya kepemimpinan (Samsi, 2011: 5).

Banyaknya kelompok tani yang kurang atau tidak aktif, berpengaruh pada upaya pembangunan pertanian karena pembangunan pertanian di Indonesia sebagian besar digerakkan melalui penyuluhan melalui kelompok- kelompok tani. Kelompok tani yang aktif dan berhasil sebagai unit belajar, unit kerjasama, unit produksi, dan unit usaha sangat mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Sebaliknya kelompok tani yang kurang atau tidak aktif akan menyebabkan pembangunan pertanian terhambat. Keberhasilan kelompok tani dapat terlihat dari tercapainya tujuan akhir pembangunan yakni terwujudnya masyarakat tani yang hidup sejahtera, mampu berswadaya, swasembada, mampu menolong diri sendiri dan mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi (Samsi, 2011: 6).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pemangku kepentingan telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sundawati dan Sanudin (2009) tentang analisis pemangku kepentingan dalam upaya pemulihan ekosistem daerah tangkapan air Danau Toba. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memetakan para pihak yang berkepentingan dalam pemulihan ekosistem DTA Danau Toba serta mengkaji potensi konflik dan kolaborasi para pihak untuk mewujudkan suatu *collective action*. Analisis data yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu analisis deskriptif dengan menyajikan hasil pemetaan para pemangku kepentingan dan melakukan pembahasan dengan logika ilmiah

berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem kawasan DTA Danau Toba dapat digolongkan sebagai pemangku kepentingan kunci, utama, dan pendukung. Pemangku kepentingan kunci merupakan lembaga pemerintah kabupaten yang tupoksinya berkaitan langsung dengan pemulihan ekosistem DTA Toba. Tidak terjadi konflik kepentingan antar pemangku kepentingan, namun terdapat potensi konflik diantara beberapa pemangku kepentingan.

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan Sundawati dengan penelitian yang dilakukan adalah dalam menganalisa peran pemangku kepentingan Sundawati menggunakan analisa secara deskriptif yaitu dengan menyajikan hasil pemetaan para pemangku dan melakukan pembahasan dengan logika ilmiah berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Sedangkan penelitian ini membandingkan peran di juknis dengan dengan pelaksanaan untuk mengetahui peran pemangku kepentingan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sundawati dengan penelitian ini adalah sama- sama menggunakan analisa secara deskriptif.

Penelitian yang dilakukan oleh Hardiansyah (2012) yang berjudul analisis peran berbagai *stakeholders* dalam menyongsong era pembangunan KPH di Kabupaten Ketapang. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk menganalisis permasalahan dalam menyongsong pembangunan KPH di Kabupaten Ketapang, dan mengetahui peran antara pengelola KPH dengan *stakeholders* lain dalam pembangunan KPH di Kabupaten Ketapang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *stakeholders*, untuk mengidentifikasi kepentingan dan peran berbagai *stakeholders* dengan tujuan akhir dapat memberikan rekomendasi startegis untuk melanggengkan partisipasi para pemangku kepentingan. Perbedaan penelitian yang dilakukan Hardiansyah dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini akan menggunakan metode survei sedangkan penelitian ini akan menggunakan metode studi kasus. Persamaan penelitian oleh Hardiansyah dengan penelitian ini adalah penelitian Hardiansyah juga melihat peran dari pemangku kepentingan dan penelitian ini juga melihat peran dari pemangku kepentingan.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu pembangunan KPH tidak mudah untuk diimplementasikan karena beberapa permasalahan yang membutuhkan penanganan secara serius. Permasalahan internal dalam pembangunan KPH Ketapang yaitu (1) keterlibatan SDM, (2) Keterbatasan anggaran dan (3) Belum ada dukungan PERDA. *Stakeholders* yang terlibat dalam pembangunan KPH Rinjani Barat adalah Dishut Provinsi dan Kabupaten, BPDAS, LSM, universitas, masyarakat, Bappeda, calon KPH, calon dunia usaha yang akan mendukung pembangunan KPH dalam aspek ekonomi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Roslinda, Darusman, Suharjito, dan Ridho (2012) yang berjudul analisis pemangku kepentingan dalam pengelolaan taman nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Tujuan penelitian tersebut ialah mendapatkan bentuk-bentuk hubungan antarpihak yang berkepentingan terhadap TNDS melalui analisis kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan di kawasan TNDS sehingga dapat terwujud pengelolaan TNDS yang lebih baik.

Data dianalisis dengan menggunakan analisa pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan diterapkan untuk mengungkapkan kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan, memahami sinergi dan konflik antarpemangku kepentingan, dan memahami permintaan pemangku kepentingan terhadap fungsi dan jasa ekosistem dari TNDS. Perbedaan penelitian Roslinda dengan penelitian ini yaitu tujuan yang ingin dicapai dari penelitiannya. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Roslinda dengan penelitian ini adalah sama-sama menguraikan hasil secara deskriptif.

Hasil penelitian tersebut yaitu Pengelolaan TNDS perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai kepentingan dan pengaruh dengan kawasan TNDS. Sebagai sumber daya alam publik, keberadaan TNDS memang menyangkut kepentingan banyak pihak. Pengelolaan tunggal dan masih sentralistik yang dilakukan pihak BTNDS terbukti tidak dapat mencapai tujuan pembentukan TNDS. Untuk itu, sudah saatnya dilakukan pengelolaan secara bersama dengan pemangku kepentingan yang terlibat untuk membangun suatu kolaborasi pengelolaan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan alasan bahwa Kecamatan Kuranji merupakan kecamatan yang memiliki lahan pekarangan paling luas tahun 2013 di Kota Padang (Lampiran 4), Kelurahan Korong Gadang merupakan salah satu lokasi pengembangan KRPL tahun 2013 di Kecamatan Kuranji (Lampiran 3). Penelitian ini dilakukan pada Kelompok Wanita Tani Lestari Padi Rimbun, karena berdasarkan wawancara dari Penyuluh Pertanian Lapangan Kelompok Wanita Tani Lestari Padi Rimbun merupakan KWT yang masih melaksanakan kegiatan program KRPL walaupun program telah berakhir. Menurut informasi dari PPL KWT Lestari Padi Rimbun ini telah mampu menjual hasil dari tanaman yang dibudidayakan melalui program KRPL. Penelitian ini telah dilaksanakan 1 bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat penelitian dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas yaitu dari tanggal 4 Maret 2015 hingga 5 April 2015.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, menurut Sugiyono (2012: 209) metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang mengeksplorasi dan memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Lebih khususnya penelitian ini dilaksanakan dengan metode studi kasus (*case study*). Studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok dan situasi (Sugiyono, 2012: 210). Metode studi kasus (*case study*) ini memungkinkan memberikan gambaran secara mendetail tentang pelaksanaan program serta peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari pada Kelompok Wanita Tani Lestari Padi Rimbun di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Menurut Nazir (2003: 174) pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang ingin dicapai maka penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk penguasaan lapangan, serta melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan yaitu data yang berasal dari instansi yang terkait dengan objek penelitian yaitu: (1) Badan Ketahanan Pangan Kota Padang data yang diperoleh yaitu petunjuk teknis pelaksanaan KRPL, jumlah kelompok penerima program KRPL mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2014 (2) Badan Pusat Statistik, data yang diperoleh yaitu data mengenai kondisi geografis dan demografis Kecamatan Kuranji (3) Kelurahan Korong Gadang, data yang diperoleh yaitu mengenai kondisi geografis dan demografis Kelurahan Korong Gadang (4) Kelompok Wanita Tani Lestari Padi Rimbun, data yang diperoleh yaitu mengenai profil KWT, AD/ART KWT, dan SK KWT (5) serta literatur yang terkait dengan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data primer yang diperoleh yaitu wawancara secara mendalam yang dilakukan kepada informan kunci yang dalam hal ini umumnya adalah lembaga atau orang yang bertanggung jawab terhadap lembaga yang bersangkutan, serta informan kunci dari beberapa orang anggota Kelompok Wanita Tani Lestari Padi Rimbun. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2010: 132). Pemilihan informan kunci dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan kriteria yaitu lembaga (staff) atau pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap program KRPL di Kota Padang. Informan kunci dipilih berdasarkan petunjuk teknis program KRPL dan disesuaikan dengan

kondisi di lapangan. Berdasarkan identifikasi maka pemangku kepentingan yang terlibat dalam program KRPL di KWT Lestari Padi Rimbun yaitu BPTP, Dispernakbunhut Kota Padang, Lurah Korong Gadang, Badan Ketahanan Pangan Kota Padang, Penyuluh Pendamping Lokasi dan dari pihak KWT Lestari Padi Rimbun. Informan kunci yang berasal dari anggota kelompok wanita tani dipilih dua orang anggota yang mengikuti seluruh proses, pemilihan tersebut dilakukan secara sengaja dengan kriteria: (1) anggota yang mengikuti sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan (2) anggota yang masih ikut serta dalam mengelola kebun bibit kelompok dan (3) anggota yang masih memanfaatkan pekarangan rumah dalam budidaya tanaman. Penjabaran informan kunci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1. Daftar Informan Kunci

No	Informan Kunci	Jumlah
1.	BPTP	1 orang
2.	Dispernakbunhut Kota padang	1 orang
3.	Lurah Korong Gadang	1 orang
4.	Badan Ketahanan Pangan Kota Padang	1 orang
5.	Penyuluh Pendamping Lokasi	1 orang
6.	Anggota KWT Lestari Padi Rimbun	2 orang

D. Topik Data

Untuk mencapai tujuan pertama mendeskripsikan pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari pada Kelompok Wanita Tani Lestari Padi Rimbun di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang maka data yang dikumpulkan yaitu data setiap kegiatan, baik perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. Data yang digunakan yaitu pada Februari 2013 hingga Februari 2015 yang berdasarkan pada Petunjuk Teknis Program Kawasan Rumah Pangan Lestari yang terdiri dari:

1. Tahap persiapan program
 - a. Pengumpulan informasi awal tentang potensi sumberdaya, lokasi, dan kelompok sasaran.
 - b. Koordinasi dengan dinas terkait untuk mencari kesepakatan dalam penentuan calon kelompok sasaran dan lokasi.
 - c. Memilih pendamping/penyuluh pertanian yang menguasai teknik

pemberdayaan masyarakat serta petugas pelaksana dari instansi terkait.

2. Sosialisasi Program

Penyampaian maksud dan tujuan kegiatan dan membuat kesepakatan untuk rencana tindak lanjut yang dilakukan pada kelompok sasaran dan pemuka masyarakat serta petugas pelaksana.

3. Pembentukan Kelompok

Kelompok sasaran yaitu rumah tangga atau kelompok rumah tangga dalam satu Rukun Tetangga, Rukun Warga, atau satu kelurahan/desa/nagari. Setelah kelompok terbentuk dilakukan peningkatan kemampuan kelompok:

- a. Mengambil keputusan bersama melalui musyawarah
- b. Mentaati keputusan yang telah ditetapkan bersama
- c. Memperoleh dan memanfaatkan informasi
- d. Bekerjasama dalam kelompok
- e. Bekerja dengan aparat maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat lain

4. Perencanaan Kegiatan

- a. Melakukan perencanaan/rancang bangun pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam berbagai tanaman pangan, sayuran, tanaman obat keluarga, buah-buahan, ikan dan ternak.
- b. Penyusunan rencana kerja satu tahun.

5. Pelatihan

Pelatihan dilakukan sebelum atau saat pelaksanaan di lapangan, jenis pelatihan yang dilakukan yaitu: teknik budidaya tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, tanaman obat keluarga, teknik budidaya ikan dan ternak, perbenihan, pembibitan, pengolahan hasil dan pemasaran serta teknologi pengolahan limbah rumah tangga.

6. Implementasi

Implementasi kegiatan dilaksanakan oleh kelompok dengan pengawalan teknologi oleh BPTP, penyuluh/pendamping serta petani andalan.

7. Monitoring dan Evaluasi

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan kawasan dan menilai kesesuaian kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mencapai tujuan kedua yaitu menganalisis peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari pada Kelompok Wanita Tani Lestari Padi Rimbun di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, maka data yang diamati adalah peran semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program KRPL pada Februari 2013 hingga Februari 2015. Data yang diamati dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Peran Pemangku Kepentingan dalam Program KRPL

Pemangku Kepentingan	Peran Menurut Juknis
Badan Ketahanan Pangan Kota Padang	Melakukan perencanaan
	Melakukan sosialisasi KRPL
	Memberikan bantuan sosial
	Melakukan monitoring kegiatan
BPTP	Memberikan Percontohan KRPL
	Melakukan pendampingan dalam Penerapan KRPL
Dispernakbunhut Kota Padang	Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Kelompok
	Melakukan Keberlanjutan kegiatan
	Mengkoordinasikan kegiatan di Lapangan
Lurah Korong Gadang	Melakukan perencanaan
	Melakukan Pendampingan
Penyuluh Pertanian	Melakukan Pendampingan Kelompok
	Membuat Pelaporan Kegiatan
KWT Lestari Padi Rimbun	Mengimplementasikan KRPL
	Mengelola Dana Bantuan Sosial

Sumber : Petunjuk Teknis KRPL Tahun 2013

E. Analisis Data

Untuk mencapai tujuan pertama mendeskripsikan pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari pada Kelompok Wanita Tani Lestari Padi Rimbun di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang pelaksanaan program KRPL mulai dari proses persiapan program, pembentukan kelompok, sosialisasi, perencanaan kegiatan, pelatihan dan implementasi. Indikator keberhasilan yang

diharapkan dari tujuan pertama ini yaitu terlaksananya program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program. Dimana dianalisa berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang telah ditetapkan, keseluruhan data yang dikumpulkan ditabulasi dan dianalisa sesuai kebutuhan.

Untuk tujuan kedua, yaitu mendeskripsikan peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari pada Kelompok Wanita Tani Lestari Padi Rimbun di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program KRPL di KWT Lestari Padi Rimbun.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Korong Gadang

1. Kondisi Geografis

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2013: 11), Kecamatan Kuranji terdiri atas 9 kelurahan, yaitu Kelurahan Anduring, Kelurahan Pasar Ambacang, Kelurahan Lubuk Lintah, Kelurahan Ampang, Kelurahan Kalumbuk, Kelurahan Korong Gadang, Kelurahan Kuranji, Kelurahan Gunung Sarik dan Kelurahan Sungai Sapiah. Secara keseluruhan luas wilayah Kota Padang yaitu 694,96 Km² sedangkan luas wilayah Kecamatan Kuranji adalah 57,41 Km² atau sekitar 8,26% dari total luas keseluruhan wilayah Kota Padang.

Secara geografis Kecamatan Kuranji terletak antara 0° 58' 4" Lintang Selatan dan 100° 21' 11" Bujur Timur. Daerah Kecamatan Kuranji termasuk dataran yang cukup tinggi dari permukaan laut, yaitu berada pada 8-1000 mdpl dengan curah hujan rata-rata 384,88 mm/bulan. Dengan kondisi wilayah Kecamatan Kuranji tersebut maka tidak terlalu sulit untuk pengembangan KRPL. Hal ini dikarenakan banyak varietas tanaman yang dapat dikembangkan didataran yang rendah. Secara administrasi, Kecamatan Kuranji berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Kecamatan Koto Tangah
Sebelah Selatan	: Kecamatan Padang Timur dan Padang Utara
Sebelah Timur	: Kecamatan Pauh
Sebelah Barat	: Kecamatan Nanggalo

Kelurahan Korong Gadang memiliki luas wilayah 705 ha atau sekitar 12,2% dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Kuranji, Kelurahan Korong Gadang merupakan wilayah terluas ke 4 di Kecamatan Kuranji. Kelurahan Korong Gadang terdiri dari 71 RT dan 16 RW (Badan Pusat Statistik, 2013: 11).

Penggunaan lahan di Kelurahan Korong Gadang terdiri atas tiga penggunaan, yaitu pemukiman, sawah, pekarangan dan kuburan. Luas pemukiman yaitu 530 ha, sedangkan luas sawah yaitu 150 ha. Luas pekarangan di wilayah Korong Gadang yaitu 24 ha dan untuk penggunaan sebagai lahan perkuburan sebesar 1 ha. Penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penggunaan lahan di Kelurahan Korong Gadang Tahun 2012

No	Penggunaan Lahan	Jumlah (ha)	Persentase
1.	Pemukiman	530	75,2%
2.	Pertanian	150	21,3%
3.	Pekarangan	24	3,4%
4.	Kuburan	1	0,1%
Jumlah		705	100%

Sumber: Profil Kelurahan Korong Gadang Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa sekitar 75,2% lahan di Kelurahan Korong Gadang digunakan sebagai pemukiman, sedangkan sekitar 21,3% digunakan sebagai pertanian. Selanjutnya lahan yang digunakan sebagai pekarangan sekitar 3,4% dan sebagai kuburan 0,1%. Hal ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan cenderung meningkat tiap tahunnya. Salah satu staff di Kelurahan Korong Gadang, menjelaskan :

"Dalam beberapa tahun terakhir ini, penggunaan lahan di Kelurahan Korong Gadang telah berubah, yang dulunya banyak lahan pertanian, kini telah digunakan sebagai lahan pemukiman. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk di Kelurahan Korong Gadang yang semakin meningkat".

2. Kondisi Demografis

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2013: 16), Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Kuranji pada Tahun 2013 yaitu laki- laki berjumlah 67.448 orang atau sekitar 16% dari total penduduk laki- laki di Kota Padang dan perempuan berjumlah 68.339 orang atau sekitar 15,8% dari total penduduk perempuan di Kota Padang. Sedangkan untuk Kelurahan Korong Gadang sendiri jumlah penduduk perempuan laki- laki yaitu sebesar 9.104 orang atau sekitar 50,1% dan jumlah penduduk perempuan sebesar 9.084 orang atau sekitar 49,9%. Pembagian penduduk Kecamatan Kuranji berdasarkan kelurahan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Kuranji Tahun 2013

No	Kelurahan	Jenis kelamin (orang)			
		Laki- laki	Persentase (%)	Perempuan	Persentase (%)
1.	Anduring	6.105	44,2%	7.706	55,8%
2.	Pasar Ambacang	8.763	50,2%	8.687	49,8%
3.	Lubuk Lintah	4.943	51%	4.756	49%
4.	Ampang	3.110	48,7%	3.270	51,3%
5.	Kalumbuk	4.901	50,7%	4.759	49,3%
6.	Korong Gadang	9.104	50,1%	9.084	49,9%
7.	Kuranji	15.823	51%	15.764	49%
8.	Gunung Sarik	8.419	50,6%	8.206	49,4%
9.	Sungai Sapih	6.280	50,7%	6.107	49,3%
	Jumlah	67.448		68.339	

Sumber: BPS Kecamatan Kuranji Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat persentase jumlah penduduk di Kelurahan Korong Gadang tahun 2013 termasuk jumlah kedua terbesar di wilayah Kecamatan Kuranji yaitu dengan jumlah penduduk laki- laki sebesar 9.104 orang atau sekitar 50,1% dan penduduk perempuan sebesar 9.084 orang sekitar 49,9%. Secara keseluruhan total jumlah penduduk laki- laki dan perempuan di Kelurahan Korong Gadang yaitu 18.188 orang atau sekitar 13,4% dari total jumlah penduduk di Kecamatan Kuranji.

Tingkat kesejahteraan penduduk di Kelurahan Korong Gadang dibagi menjadi tiga kategori yaitu KK miskin, KK sedang dan KK kaya. Kategori tersebut didasarkan pada tingkat pendapatan yang diterima oleh keluarga. Kesejahteraan penduduk di Kelurahan Korong gadang lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Kesejahteraan KK di Kelurahan Korong Gadang Tahun 2012

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah KK	Persentase
1.	KK Miskin	572	14,7%
2.	KK Sedang	1957	50,3%
3.	KK Kaya	1362	35%
	Jumlah	3885	100%

Sumber: Profil Kelurahan Korong Gadang Tahun 2012

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa pada umumnya masyarakat Kelurahan Korong Gadang dapat dikategorikan dalam kesejahteraan keluarga sedang yaitu dengan persentase jumlah KK sedang sebesar 50,3%. Sedangkan untuk persentase KK miskin berjumlah 14,7% dari total KK secara keseluruhan.

Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Korong Gadang tersebar menjadi 10 jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Korong Gadang Tahun 2012

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase
1.	PNS	1.462	29 %
2.	TNI	40	0,9 %
3.	Polisi	58	1 %
4.	Swasta	652	13 %
5.	Wiraswasta	587	12 %
6.	Petani	890	18 %
7.	Buruh	767	15 %
8.	Nelayan	5	0,1 %
9.	Pensiunan	276	5 %
10.	Dagang	335	6 %
Jumlah		5.072	100 %

Sumber: Profil Kelurahan Korong Gadang Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa pertanian merupakan mata pencaharian tertinggi kedua setelah PNS yaitu sebesar 18%. Hal ini menandakan bahwa masyarakat di Kelurahan Korong Gadang masih mengusahakan pertanian menjadi mata pencaharian utama bagi keluarganya. Hal ini memberikan peluang bagi pengembangan KRPL, karena masyarakat telah mengetahui tentang budidaya tanaman. Dengan memanfaatkan peluang tersebut dapat menambah pendapatan masyarakat dengan hal tersebut maka jumlah KK miskin dapat ditekan.

Pendapatan masyarakat Kelurahan Korong Gadang sebagian besar masih bersumber dari sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perikanan serta peternakan). Pada tahun 2012 jumlah pendapatan dari sektor pertanian yaitu sebesar Rp 13.559.167.000 sedangkan pendapatan dari peternakan yaitu sebesar Rp 10.759.500.000. Penyebaran pendapatan penduduk Korong Gadang dapat dilihat dalam Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah Pendapatan Masyarakat Korong Gadang Berdasarkan usaha Tahun 2012

No	Jenis Kegiatan	Pendapatan (Rp)
1.	Pertanian	
	- Pertanian tanaman pangan	13.559.167.000
	- Perikanan	565.000.000
	- peternakan	10.759.500.000
	Total	24.883.667.000
2.	Jasa	450.000.000
3.	Industri Rumah Tangga	
	- Makanan Kecil	639.000.000
	- Sulaman	540.000.000
	- Kerajinan Tas	6.000.000
	- Kerajinan Tempurung	21.600.000
	Total	1.206.600.000
	Total	26.540.267.000

Sumber : Profil Kelurahan Korong Gadang 2012

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat persentase jumlah pendapatan masyarakat di Kelurahan Korong Gadang. Sektor pertanian merupakan pendapatan tertinggi masyarakat yaitu sebesar Rp 24.883.667.000 atau sekitar 93,8% dari total pendapatan. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri yaitu sebesar Rp 1.206.600.000 atau sekitar 4,5% dari total pendapatan. Kemudian dari sektor jasa sebesar Rp 450.000.000 atau sekitar 1,7% dari total pendapatan.

Jenis komoditas yang dikembangkan oleh masyarakat yang mengelola pertanian yaitu terdiri dari tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Tanaman pangan yang diusahakan terdiri dari padi sawah, ubi kayu, kacang tanah, ubi jalar dan jagung. Sedangkan untuk tanaman hortikultura jenis tanaman yang dibudidayakan yaitu kacang panjang, mentimun, terung, bayam, kangkung dan bengkuang. Untuk usaha peternakan pada umumnya masyarakat mengusahakan kerbau, sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam ras pedaging dan bebek.

3. Lembaga Perekonomian

Di Kelurahan Korong Gadang terdapat beberapa lembaga perekonomian yang membantu pengembangan ekonomi masyarakat. Jenis lembaga tersebut dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Lembaga Perekonomian yang Ada di Kelurahan Korong Gadang Tahun 2012

No	Lembaga perekonomian	Jumlah (unit)
1.	Koperasi	7
2.	Warung Makanan	317
3.	Toko/ Kios	94
4.	KJKS UMT	1
5.	Kelompok Tani	12

Sumber: Profil Kelurahan Korong Gadang Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa di Kelurahan Korong Gadang masih tersedia koperasi simpan pinjam yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam membantu perekonomian mereka. Selain itu juga terdapat banyak warung makanan yang diusahakan oleh masyarakat di Kelurahan Korong Gadang. Terdapat juga toko/ kios yang tersebar di wilayah Kelurahan Korong Gadang. Terdapat KJKS UMT di Kelurahan Korong Gadang, KJKS UMT tersebut telah memiliki badan hukum. Kelompok tani di Kelurahan Korong Gadang berjumlah 12 unit, keseluruhan kelompok tani telah memiliki SK dari Lurah Korong Gadang.

B. Profil KWT Lestari Padi Rimbun

1. Sejarah Berdiri

Kelompok tani menurut peraturan Kementerian Pertanian tahun 2013 ialah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. KWT Lestari Padi Rimbun merupakan kelompok yang terbentuk atas dasar kegiatan yang dilakukan oleh perkumpulan ibu- ibu PKK. Ibu- ibu tersebut rutin mengadakan pertemuan setiap 1 bulan sekali. Pertemuan tersebut dilakukan dalam bentuk arisan, dalam acara arisan tersebut ibu- ibu tersebut juga sering melakukan kegiatan berupa pelatihan masak- memasak. Selain itu ibu- ibu tersebut juga sering saling bertukar pikiran dan berbagi pengetahuan dalam budidaya pertanian.

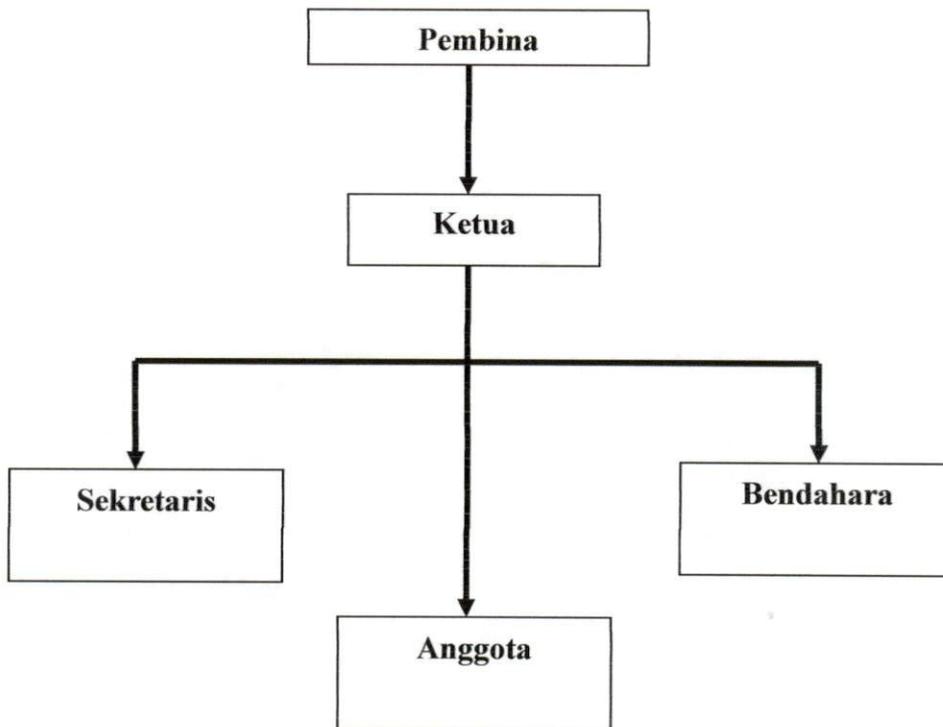
Karena sering melakukan kegiatan bersama, maka ibu- ibu tersebut telah dicalonkan oleh penyuluh pertanian setempat untuk dijadikan calon penerima program KRPL. Selain melakukan kegiatan PKK, sebagian anggota PKK tersebut merupakan ibu- ibu yang juga ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani yang telah ada sebelumnya. Hal tersebutlah yang membuat kelompok PKK ini akhirnya mendapat program KRPL. Berdasarkan surat keputusan dari Lurah Korong Gadang KWT ini secara resmi berdiri pada tanggal 9 Maret 2013. Kelompok Wanita Tani Lestari Padi Rimbun merupakan salah satu kelompok penerima program KRPL dari Badan Ketahanan Pangan Kota Padang.

Sebagai sebuah kelompok, KWT Lestari Padi Rimbun telah memiliki legalitas. Legalitas tersebut dapat membantu kelompok untuk mendapatkan dana bantuan sosial dan program yang berkenaan dengan pertanian. Dengan legalitas tersebut kelompok tersebut telah diakui keberadaanya dan segala macam kegiatan yang dilakukan dalam rangka mensejahterakan anggota dan masyarakat di sekitar wilayah KWT Lestari Padi Rimbun.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KWT Lestari Padi Rimbun terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Pembina dari KWT Lestari Padi Rimbun ini yaitu Lurah Korong Gadang dan penyuluh pertanian. Selama masa berdirinya, struktur organisasi ini belum pernah mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan belum ada pembicaraan dan rapat mengenai pergantian struktur organisasi. Struktur organisasi KWT Lestari Padi Rimbun periode tahun 2013 – 2016 dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3.
Struktur Organisasi KWT Lestari Padi Rimbun Periode 2013 – 2016



Berdasarkan temuan dilapangan struktur organisasi KWT tersebut merupakan struktur secara tertulis namun dalam pelaksanaan, ketua dan sekretaris tidak menjalankan fungsinya. Tugas- tugas ketua banyak dijalankan oleh bendahara hal ini dikarenakan kesibukan mereka dalam pekerjaan di lahan pertanian milik pribadi. Selain itu kurang jalannya fungsi ketua juga dikarenakan kurang berjalannya komunikasi yang dilakukan antar anggota dan ketua kelompok. Setiap ada kegiatan ketua jarang hadir dilokasi pertemuan untuk membicarakan kegiatan kelompok yang dilakukan kelompok dan penyuluh. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu anggota KWT :

“Sekretaris hanya datang pada saat awal program KRPL saja setelah itu beliau jarang mengunjungi kebun bibit kelompok. Selanjutnya untuk kelancaran kegiatan tugas- tugas sekretaris dikerjakan oleh bendahara kelompok. Untuk ketua masih sering berkomunikasi dengan penyuluh pertanian, tapi tingkat kehadirannya masih rendah. Beliau hadir jika kegiatan tersebut dihadiri oleh Badan Ketahanan Pangan atau dari instansi formal saja”.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dilapangan, pada saat ada pertemuan kegiatan kelompok, ketua telah diberi tahu untuk kegiatan tersebut dan ketua hadir dalam agenda kegiatan tersebut. Hanya saja ketua tidak ikut serta dalam perencanaan kegiatan yang beliau hadiri tersebut. Ketika ditanyakan kenapa tidak ikut serta beliau menjawab bahwa kegiatan yang dilakukan diadakan secara mendadak dan ibu penyuluh telah memberi tahu kepada salah satu anggota yang aktif untuk diberitahu kepada semua anggota kelompok.

3. Keanggotaan

Anggota dari KWT ini berjumlah 36 orang yang terdiri dari ibu- ibu PKK dan ibu- ibu anggota Kelompok Tani Padi Rimbun namun di dalam Surat Keputusan dari Lurah Korong Gadang anggota KWT berjumlah 35 orang, hal ini dikarenakan 1 orang lagi masuk dalam keanggotaan setelah surat keputusan terbentuk. Umumnya anggota merupakan ibu- ibu rumah tangga yang juga memiliki lahan pertanian yang ditanami padi dan tanaman hortikultura lainnya. Ibu- ibu tersebut telah memiliki pengalaman dalam budidaya pertanian oleh sebab itu dalam proses pelaksanaan program KRPL ibu- ibu tersebut mudah untuk memahami teknik budidaya pertanian khususnya tanaman pangan dan tanaman obat keluarga.

Berdasarkan temuan dilapangan anggota yang berjumlah 36 orang tidak hadir secara keseluruhan dalam setiap kegiatan kelompok. Dalam pertemuan dan kegiatan kelompok hanya beberapa anggota saja yang hadir dalam setiap kegiatan. Anggota yang rutin hadir dalam setiap kegiatan yaitu lebih kurang 5 orang dan dihadiri juga oleh bendahara kelompok. Anggota lainnya tersebut jarang hadir dalam kegiatan kelompok, mereka hadir jika pekerjaan dirumah mereka telah selesai dikerjakan.

4. Potensi dan Aset Produktif KWT

Konsep KRPL tidak hanya memanfaatkan pekarangan milik anggota saja tetapi lahan yang ada disekitar rumah yang ada di wilayah kelompok. Untuk pekarangan KWT Lestari Padi Rimbun ini cukup banyak potensi lahan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan lokasi KWT berada di daerah yang masih banyak lahan yang ditanami dengan padi sawah. Di depan lokasi kebun bibit kelompok ada lahan padi milik masyarakat dan milik anggota kelompok, di sekitar sawah dan rumah tersebut dapat ditanami dengan tanaman seperti tanaman hias, tanaman obat keluarga dan tanaman sayuran. Tetapi faktanya anggota kelompok tidak memanfaatkan secara optimal lahan tersebut.

Sebagai kelompok wanita yang telah berdiri selama 2 tahun, berbagai macam fasilitas telah dimiliki oleh KWT Lestari Padi Rimbun. Fasilitas dan alat-alat tersebut dibeli dari dana kas kelompok, iuran kelompok dan dari dana bantuan sosial. Fasilitas dan alat-alat tersebut seperti rak vertikultur, rumah bibit, kompor, blender dan alat masal lainnya. Alat-alat tersebut digunakan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan kelompok, seperti gotong royong, demo masak dan kegiatan lainnya.

5. Kegiatan yang Dilakukan KWT Lestari Padi Rimbun

Kelompok Wanita Tani ini telah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). AD/ART ditetapkan secara bersama dengan dibina oleh penyuluh pertanian wilayah kerja Kelurahan Korong Gadang. Berdasarkan profil KWT Lestari Padi Rimbun adapun kegiatan dari KWT ini adalah

1. Pemanfaatan lahan pekarangan anggota kelompok. Kegiatan ini dilakukan pada Februari 2013 sampai saat ini. Kegiatan ini telah diikuti oleh semua anggota kelompok tetapi tidak semua anggota yang memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal. Dalam pelaksanaan pemanfaatan lahan tersebut kelompok dibantu dan didampingi oleh penyuluh pertanian.
2. Pembuatan demplot kebun kelompok yang terletak di sekretariat KWT Lestari Padi Rimbun ditanami tanaman seperti seledri, cabe, terong, tomat dan caiysin. Selain itu juga ditanami jahe, lengkuas, daun serai dan kunyit. Pembuatan demplot ini merupakan kegiatan yang harus ada di setiap

- kelompok. Demplot dibuat berdasarkan rancangan yang telah direncanakan sebelumnya, pembuatan demplot dibantu oleh penyuluh pertanian.
3. Melaksanakan sosialisasi gerakan 3BA (Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman), melestarikan makanan tradisional yang berbahan baku lokal. Sosialisasi ini telah dilaksanakan dua kali selama berdirinya kelompok. Sosialisasi pertama diadakan bersama dengan penyuluh pertanian Korong Gadang dan sosialisasi kedua diadakan demo masak makanan sehat dengan penyuluh pertanian wilayah kerja Kelurahan Durian Taruang.
 4. Mengadakan pertemuan kelompok yang dipandu oleh penyuluh pertanian. Kegiatan pertemuan rutin dilaksanakan selama 1 bulan sekali, yaitu dilokasi sekretariat kelompok.

Berdasarkan uraian mengenai profil diatas dapat disimpulkan bahwa KWT Lestari Padi Rimbun telah berdiri sejak 2 tahun yang lalu. Kelompok tersebut terbentuk karena ibu- ibu anggota telah sering melakukan kegiatan PKK sebelumnya. Jumlah anggota KWT Lestari Padi Rimbun yaitu 36 orang, tidak semua anggota yang ikut serta pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok dan penyuluh pertanian. Dalam setiap pertemuan kelompok dan setiap kegiatan yang dilakukan di lokasi kebun bibit hanya beberapa anggota yang hadir dan ikut serta. Hal ini dikarenakan karena tidak adanya absensi serta sanksi yang diberikan kepada anggota yang tidak hadir, sehingga anggota tidak disiplin dan tidak patuh terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Deskripsi ringkas mengenai profil KWT dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Deskripsi Ringkas Profil KWT Lestari Padi Rimbun

No	Aspek yang Diamati	Deskripsi Ringkas
1.	Sejarah Berdirinya	Berdiri pada tanggal 9 maret 2013 yang sebelumnya merupakan ibu- ibu anggota PKK yang sering mengadakan pertemuan. Secara legalitas didirikan sebagai KWT karena ada program KRPL.
2.	Struktur Organisasi	Struktur organisasi KWT Lestari Padi Rimbun periode Tahun 2013 - 2016 terdiri dari pembina, ketua, sekretaris dan bendahara. Struktur organisasi tersebut merupakan struktur secara tertulis, karena dalam pelaksanaan dilapangan struktur tersebut tidak berjalan sesuai peran. Ketua dan sekretaris tidak memainkan perannya.
3.	Keanggotaan	Jumlah anggota KWT Lestari Padi Rimbun yaitu 36 orang. Anggota tersebut terdiri dari ibu- ibu PKK dan ibu- ibu yang mengusahakan pertanian. Tidak semua anggota hadir dalam kegiatan kelompok, hal tersebut dikarenakan tidak adanya sangsi dan teguran yang diberikan kepada anggota yang tidak menghadiri kegiatan. Sehingga tidak ada kedisiplinan anggota dan membuat anggota tidak ikut dalam kegiatan.
4.	Potensi dan Aset Produktif KWT	Banyak lahan pekarangan disekitar area rumah anggota kelompok yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam budidaya tanaman hias, tanaman obat keluarga dan tanaman pangan. Lahan yang berpotensi tersebut tidak dmanfaatkan oleh kelompok secara optimal.
5.	Kegiatan yang Dilakukan KWT Lestari Padi Rimbun	Kegiatan utama yang dilakukan oleh KWT Lestari Padi Rimbun yaitu memanfaatkan lahan pekarangan dan pengembangan kebun bibit kelompok. Selain kegiatan tersebut kelompok juga mengadakan kegiatan sosialisasi membuat masakan yang bergizi dan sehat.

C. Pelaksanaan Program KRPL di KWT Lestari Padi Rimbun

1. Latar Belakang

Program KRPL di Sumatera Barat merupakan program yang dikembangkan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan keberlanjutan dari Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal yang telah dilaksanakan pada tahun 2010. Kegiatan KRPL mulai dilaksanakan di Kota Padang pada akhir tahun 2011 yaitu di Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan. Awal tahun 2012 KRPL telah dikembangkan ke Kelurahan lain hingga tahun 2014 telah banyak kelompok wanita penerima program KRPL ini. Untuk di KWT Lestari Padi Rimbun kegiatan telah dilaksanakan pada awal tahun 2013 bersama dengan 19 kelompok wanita lainnya yang tersebar di beberapa Kelurahan lainnya di Kota Padang (Lampiran 3).

Badan Ketahanan Pangan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam kegiatan KRPL di KWT Lestari Padi Rimbun. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan ini yaitu BPTP, Dispernakbunhut, Lurah Korong Gadang dan penyuluh pertanian wilayah kerja Kelurahan Korong Gadang. Pihak-pihak tersebut dilibatkan mulai dari perencanaan, Implementasi sampai monitoring dan evaluasi.

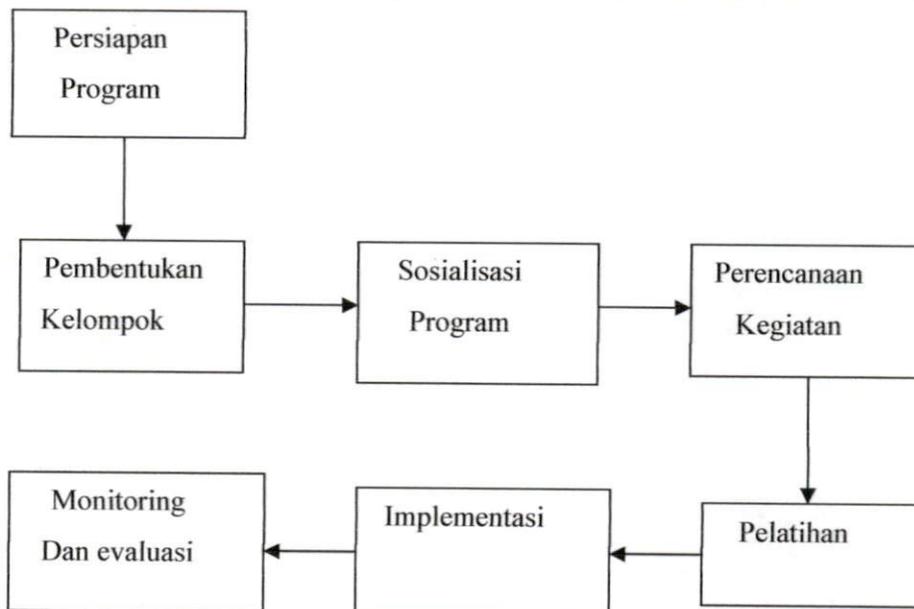
2. Deskripsi Program

Kegiatan KRPL di KWT Lestari Padi Rimbun mulai dilaksanakan pada Februari 2013 kegiatan tersebut masih berlanjut hingga 2015. Badan Ketahanan Pangan sebagai penyelenggara program telah memberikan dana bantuan sosial kepada KWT Lestari Padi Rimbun untuk implementasi kegiatan. Dana tersebut bersumber dari APBN tahun 2013. Jumlah dana bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok adalah sebesar Rp 47.000.000,- dengan rincian untuk optimalisasi pekarangan sebesar Rp 30.000.000,-, untuk kebun bibit sebesar Rp 12.000.000,-, untuk kebun sekolah sebesar Rp. 3000.000,-, dan untuk pengembangan menu B2SA hasil pekarangan sebesar Rp 2000.000,-. Dana bantuan sosial tersebut diberikan kepada kelompok dalam bentuk tunai yang

disalurkan melalui rekening milik Kelompok Wanita Lestari Padi Rimbun. Walaupun dalam bentuk tunai sebesar Rp 47.000.000,- kelompok tidak dapat mengambil semua uang tersebut dalam satu waktu karena pencairan dana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan telah membuat Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggota (RKKA).

Pelaksanaan Program KRPL di KWT Lestari Padi Rimbun melalui beberapa tahapan yaitu: tahap persiapan program, tahap pembentukan kelompok, tahap sosialisasi program, tahap perencanaan kegiatan, pelatihan, implementasi dan yang terakhir tahap monitoring dan evaluasi. Lebih jelasnya tahapan pelaksanaan program KRPL dapat dilihat pada gambar 4 dan mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dapat dilihat pada Tabel 10.

Gambar 4.
Alur pelaksanaan Program KRPL di KWT Lestari Padi Rimbun



Sumber: Petunjuk Teknis Pelaksanaan KRPL

Tabel 10. Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Setiap Alur Pelaksanaan Program KRPL di KWT Lestari Padi Rimbun

No	Alur Pelaksanaan	Pemangku Kepentingan					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Program	√	√		√		
2.	Pembentukan Kelompok					√	
3.	Sosialisasi Program	√				√	√
4.	Perencanaan Kegiatan					√	√
5.	Pelatihan					√	√
6.	Implementasi					√	√
7.	Monitoring dan Evaluasi	√				√	

Keterangan: 1= BKP 2= BPTP 3= Dispernakbunhut 4= Lurah Korong Gadang
5= Penyuluh Pertanian 6= KWT Lestari Padi Rimbun

Secara terperinci tentang tahapan pelaksanaan Program KRPL di Kelurahan Korong Gadang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persiapan Program

Program KRPL dimulai dengan tahapan persiapan program. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses ini yaitu:

a. Pengumpulan Informasi Awal tentang Potensi Sumberdaya, Lokasi dan Kelompok Sasaran

Pengumpulan informasi awal tentang potensi sumberdaya, lokasi dan kelompok sasaran merupakan tahapan yang paling penting dalam kegiatan KRPL karena pada tahap ini dilakukan pendekatan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat setempat. Tahapan ini dilakukan agar program yang diberikan kepada masyarakat dapat tepat sasaran sehingga tingkat keberlanjutan kegiatan ditengah-tengah masyarakat lebih besar. Pengumpulan informasi oleh Badan Ketahanan Pangan Kota Padang dilakukan pada awal bulan Februari 2013, informasi yang dikumpulkan dalam tahap ini yaitu karakteristik masyarakat setempat, potensi tanaman yang dikembangkan pada calon lokasi sasaran dan kesanggupan masyarakat atau calon kelompok dalam mengembangkan dan melaksanakan kegiatan.

Kriteria dari calon lokasi dan calon kelompok yaitu (1) kelompok wanita yang beranggotakan minimal 30 rumah tangga yang berdomisili berdekatan dalam satu kawasan, (2) bukan kelompok yang sedang menerima bantuan sosial lainnya, (3) memiliki kelembagaan dan struktur organisasi yang jelas (4) mampu menyediakan lahan untuk kebun bibit (5) setiap anggota wajib mengembangkan pemanfaatan pekarangan dan (6) mampu mengelola keuangan kelompok.

Informasi mengenai potensi sumberdaya calon lokasi dan calon kelompok sasaran dilakukan karena ada beberapa calon lokasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan program KRPL tetapi calon kelompok yang tidak mendukung yang dikarenakan keadaan masyarakat setempat yang tertutup. Namun untuk Kelurahan Korong Gadang pengumpulan informasi tidak terlalu sulit dilakukan, hal ini dikarenakan BPTP telah melakukan percontohan kegiatan KRPL ini di kelompok wanita tani lain yang berada di dekat lokasi KWT Lestari Padi Rimbun.

Untuk KWT Lestari Padi Rimbun sendiri sebelum menerima program Badan Ketahanan Pangan Kota Padang menggali informasi melalui kelompok tani yang telah terlebih dahulu ada di lokasi tersebut sehingga lebih mudah untuk daerah tersebut memperoleh program. Berdasarkan wawancara dengan Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan dari Badan Ketahanan Pangan Kota Padang beliau mengatakan bahwa pada awal pengumpulan informasi dan kunjungan lapangan, lokasi KWT Lestari Padi Rimbun cocok untuk kegiatan program KRPL selain karena daerah tersebut merupakan daerah yang masyarakatnya banyak menguapayakan kegiatan pertanian, baik sebagai kegiatan utama maupun kegiatan sampingan, sebelum adanya KWT ini ibu-ibu tersebut juga telah bergabung dengan Kelompok Tani Padi Rimbun yang telah dulu ada di daerah tersebut dan mereka ikut serta dalam program yang diberikan kepada kelompok tani tersebut.

b. Koordinasi dengan Dinas Terkait untuk Mencari Kesepakatan dalam Penentuan Calon Kelompok Sasaran dan Lokasi

Setelah dikumpulkan semua informasi mengenai calon lokasi dan calon kelompok sasaran, BKP Kota Padang melakukan pelaporan terlebih dahulu kepada BKP Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan Setelah ada izin dan kewenangan dari BKP Provinsi Sumatera Barat barulah BKP Kota Padang

melakukan koordinasi dengan Lurah Korong Gadang dan Dispernakbunhut Kota Padang. Pada tahapan ini BKP menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dan meminta bantuan dari Dispernakbunhut untuk membantu mensosialisasikan program kepada masyarakat. Selain itu BKP juga meminta agar Dispernakbunhut menentukan penyuluh pertanian yang dapat mendampingi calon kelompok sasaran.

Dalam koordinasi ini juga dilakukan bersama dengan BPTP, koordinasi yang dilakukan adalah dalam bentuk ikut serta dalam memutuskan calon lokasi dan kelompok sasaran penerima program KRPL. Staff BPTP yang ikut serta dalam koordinasi ini yaitu penyuluh BPTP. Penyuluh BPTP membantu dalam mengambil keputusan karena mereka telah terlebih dahulu mendampingi kelompok saat pelaksanaan percontohan KRPL.

c. Memilih Pendamping/Penyuluh pertanian

Penyuluh pendamping memiliki peran terdepan dalam keberhasilan program, termasuk dalam memperbaiki perilaku konsumsi pangan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan penyuluh yang menguasai teknik pemberdayaan masyarakat. BKP meminta kepada Dispernakbunhut untuk memberikan beberapa orang penyuluh pertanian untuk dijadikan pendamping kelompok dalam kegiatan KRPL bagi lokasi- lokasi penerima program. Dispernakbunhut memberikan penyuluh pendamping berdasarkan wilayah kerja penyuluh tersebut. Untuk KWT Lestari Padi Rimbun yang berlokasi di Kelurahan Korong Gadang, maka penyuluh pendamping daerah tersebut yang mendampingi kelompok sasaran tersebut. KWT Lestari Padi Rimbun sebagai penerima program didampingi oleh ibu penyuluh yang bernama Zulimar, SP. Beliau telah lama menjadi penyuluh pendamping yaitu selama 35 tahun sedangkan untuk mendampingi kelompok penerima program KRPL telah dilakukan sejak bulan April tahun 2013.

Pada pemilihan penyuluh pertanian tidak ada pendampingan dari penyuluh BPTP, berdasarkan hasil wawancara hal ini dikarenakan penyuluh BPTP mendampingi kelompok kedaerah jika ada dana dari pusat. Jadi ketika ada dana untuk turun ke lapangan maka penyuluh akan ke lapangan. Namun ketika tidak ada dana untuk turun ke lapangan maka penyuluh hanya bekerja di ruangan saja.

Oleh sebab itu penyuluh BPTP tidak ikut serta dalam mendampingi kelompok sampai implementasi. Pendampingan yang dilakukan hanya pada saat sosialisasi program yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Padang yang dihadiri oleh ketua kelompok.

Setelah ditetapkan penyuluh pendamping, maka BKP memberikan pelatihan kepada semua penyuluh pendamping program KRPL. Pelatihan dilaksanakan sebelum penyuluh mendampingi kelompok, pelatihan tersebut telah dilaksanakan selama 2 hari di Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang. Pelatihan berupa penentuan syarat- syarat yang harus dilakukan kelompok sasaran agar memperoleh program tersebut. Pendampingan kelompok sasaran program KRPL merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh penyuluh pertanian karena penyuluh tersebut diberikan honor tersendiri dari BKP, honor tersebut bersumber dari APBN.

2. Pembentukan Kelompok

Penyuluh pertanian mendampingi kelompok pada pertengahan Februari 2013. Kelompok yang dijadikan penerima program yaitu dengan kriteria minimal memiliki anggota 30 orang, terdiri dari wanita atau ibu- ibu, dan tidak sedang menerima bantuan sosial dari instansi lainnya. Setelah ditentukan kelompok barulah penyuluh pertanian melakukan pendampingan, hal yang dilakukan pertama sekali yaitu penyuluh pertanian dan kelompok penerima program membuat dan mengukuhkan pembentukan kelompok melalui surat keputusan dari Lurah Korong Gadang (Lampiran 6). Selain telah ditentukannya kepengurusan KWT, penyuluh pertanian juga mendampingi kelompok dalam menyusun AD/ART. Didalam AD/ART tersebut telah ditetapkan hak dan kewajiban anggota serta aturan- aturan dalam keanggotaan di KWT Lestari Padi Rimbun.

Dengan adanya Surat Keputusan (SK) dari Lurah Korong Gadang maka kedudukan KWT Lestari Rimbun dapat diakui. Maka SK tersebut dapat digunakan sebagai syarat dalam memperoleh program, khususnya program KRPL. SK kelompok yang telah ada kemudian diserahkan kepada BKP untuk diproses.